



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA

LAPORAN KINERJA

Periode : Triwulan III



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja (LKJ) Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) Triwulan III Tahun 2025. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat, sekaligus perwujudan akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Disusun secara objektif, LKJ ini diharapkan menjadi sarana evaluasi yang efektif sekaligus pendorong untuk peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, Direktorat POA menerapkan manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) dan Logical Framework sebagai kerangka strategis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Fokus pelaksanaan kegiatan selama Triwulan III Tahun 2025 mencakup lima bidang utama:

1. Pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen kelautan dan perikanan;
2. Operasi kapal pengawas dan pesawat patroli;
3. Penyiapan logistik armada pengawasan;
4. Pengawakan armada pengawasan;
5. Pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan;

Kita patut bersyukur, karena berbagai indikator kinerja strategis berhasil dicapai secara optimal, khususnya dalam mendukung kinerja Eselon I serta prioritas kementerian. Hal ini tidak terlepas dari sinergi seluruh jajaran, baik di pusat maupun di lapangan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan hari ini adalah hasil dari kerja keras kolektif, dan tantangan ke depan memerlukan komitmen yang lebih besar. Oleh karena itu, laporan ini juga kami posisikan sebagai dasar refleksi dan rujukan dalam proses perbaikan berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja Direktorat POA. Semoga, laporan ini dapat menjadi dokumen yang bermanfaat dalam mendorong terciptanya birokrasi yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Jakarta, 17 Oktober 2025

Direktur Pengendalian Operasi Armada



Saiful Umum, S.St.Pi, MM

Tim Penyusun

Penanggungjawab

Direktur Pengendalian Operasi Armada

Koordinator Pelaporan Direktorat POA

1. Bayu Khrisna Adrianto, S.St.Pi
2. Ikrom Bungsu, S.Pi
3. Vandra Anggriawan, SH
4. Atika Fauziah A.Md

Kontributor Pelaporan Direktorat POA

1. Davianda Bagus Hendaru, ST
2. Zuleha Ernas, S.Si, M.Si
3. Noval Reza Jaya, A.Md
4. Wiwin Herwina, A.Md
5. Rachmat Sofyan, S.St.Pi



Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Tim Penyusun	4
Daftar Isi	5
Daftar Tabel	6
Daftar Gambar	7
Daftar Lampiran	8
Ringkasan Eksekutif	9
BAB I	13
Pendahuluan	13
Latar Belakang	14
Maksud dan Tujuan	15
Isu Strategis Tahun 2025-2029	16
Tugas dan Fungsi Direktorat POA	17
Sistematika Penyajian	19
BAB II	20
Perencanaan Kinerja	20
RENSTRA DITJEN PSDKP TAHUN 2020-2024	21
Perjanjian Kinerja Dit. POA	24
ALOKASI ANGGARAN	27
BAB III	28
Akuntabilitas Kinerja	28
Pengukuran Capaian Kinerja	29
Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	31
Realisasi Anggaran	74
BAB IV	77
Penutup	77
LAMPIRAN	79



Daftar Tabel

Tabel 1. Target dan realisasi capaian kinerja Dit. POA TW III 2024	10
Tabel 2. Target dan Realisasi IKU-1 TW III Tahun 2025	33
Tabel 3. Target dan Realisasi IKU-2 TW III Tahun 2025	34
Tabel 4. Komponen Perhitungan IKU 2	35
Tabel 5. Rincian analisis pelanggaran periode Januari sd Juni 2025	35
Tabel 6. Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi Januari-Juni 2025	36
Tabel 7. Daftar Keaktifan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Juni 2025	39
Tabel 8.. Target dan Realisasi IKU 3 Periode TW III Tahun 2025	40
Tabel 9. Target dan Realisasi IKU 4 Periode TW III Tahun 2025	42
Tabel 10. Target dan Realisasi IKU 5 Periode TW III Tahun 2025	43
Tabel 11. Rincian capaian IKU 6 Direktorat POA TW III Tahun 2025	46
Tabel 12. Hasil Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP sampai dengan TW III Tahun 2025	47
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW III Tahun 2025	48
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW III Tahun 2025	48
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU 8 Periode TW III Tahun 2025	50
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU 9 Periode TW III Tahun 2025	51
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU 10 Periode TW III Tahun 2025	52
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU 11 Periode TW III Tahun 2025	53
Tabel 19. Hasil Penilaian (Survey) BKI Pada Tahun 2025	54
Tabel 20. Target dan realisasi IKU-12 periode Tahun 2025	55
Tabel 21. Rincian Pembangunan Prasarana di UPT	56
Tabel 22. Target dan realisasi IKU-13 periode TW III Tahun 2025	57
Tabel 23. Target dan realisasi IKU 14 periode Tahun 2025	58
Tabel 24. Target dan realisasi IKU-15 periode TW III Tahun 2025	59
Tabel 25. Target dan Realisasi IKU 16 Periode TW III Tahun 2025	61
Tabel 26. Target dan Realisasi IKU-17 Periode TW III Tahun 2025	62
Tabel 27. Target dan realisasi IKU 18 periode TW III Tahun 2025	63
Tabel 28. Target dan realisasi IKU 19 periode TW III Tahun 2025	64
Tabel 30. Rincian target dan realisasi IKU-20 periode TW III Tahun 2025	65
Tabel 31. Target dan realisasi IKU 21 periode TW III Tahun 2025	67
Tabel 32. Target dan realisasi IKU 22 periode TW III Tahun 2025	68
Tabel 33. Target dan realisasi IKU 23 periode TW III Tahun 2025	70
Tabel 34. Target dan realisasi IKU-24 periode TW III Tahun 2025	71
Tabel 35. Target dan realisasi IKU-24 periode TW III Tahun 2025	72
Tabel 36. Target dan realisasi IKU-26 periode TW III Tahun 2025	73
Tabel 37. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA TW III Tahun 2025	74



Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat POA	17
Gambar 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
Gambar 3 Tangkapan Layar Capaian Kinerja Direktorat POA Tahun 2025	29
Gambar 4. Komponen nilai supervisi pembinaan Pokmaswas	32
Gambar 5 Tangkapan Layar Aplikasi Si Susan	41
Gambar 6 Ilustrasi Operasi Pesawat Patroli	44
Gambar 7 Kegiatan Menghentikan, Memeriksa dan Menahan (henrikhan) oleh Kapal Pengawas	47
Gambar 8. Pengisian Bahan Bakar Minyak KP Hiu Macan Tutul 02	49



Daftar Lampiran

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	80
Lampiran 2	Rincian Hasil Operasi Pesawat Patroli	83
Lampiran 3	Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas	87



Ringkasan Eksekutif

Sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2025. Laporan ini merefleksikan komitmen Direktorat POA terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Peta Strategis Direktorat POA Tahun 2025, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tahun 2025–2029.

Sejalan dengan upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) menetapkan 5 sasaran kegiatan dan 20 indikator kinerja (IK) sebagai tolok ukur pelaksanaan program. Pada Triwulan III Tahun 2025, capaian kinerja Direktorat POA mencapai 105,92%.

Dalam aspek pelaksanaan anggaran, Direktorat POA telah merealisasikan 7 Rincian Output (RO) sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025. Adapun pagu anggaran Direktorat POA ditetapkan sebesar Rp 249.142.299.000 (dua ratus empat puluh sembilan miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Realisasi anggaran Direktorat POA pada TW III Tahun 2025 sebesar Rp. 163,491,023.000 (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 65,62% dari Pagu anggaran.

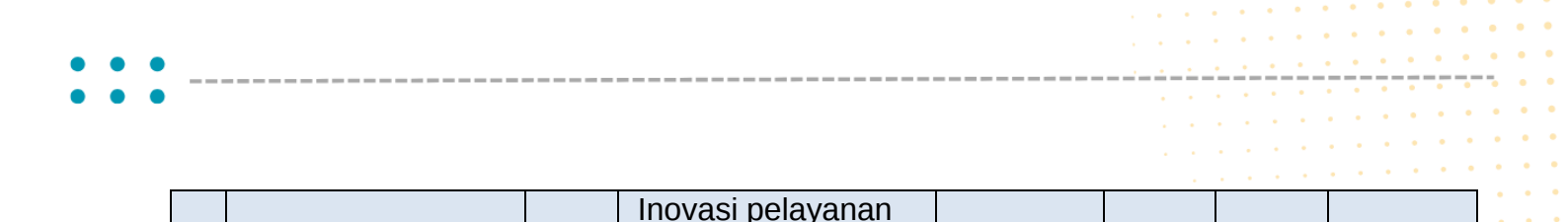
Dalam merealisasikan anggaran, Direktorat POA mengacu pada prinsip *budget follow program* secara efektif dan efisien. Artinya, setiap anggaran yang dikeluarkan harus mendukung pencapaian indikator kinerja lingkup Direktorat POA. Adapun dalam meningkatkan pencapaian kinerja organisasi serta memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan, Direktorat Pengendalian Operasi Armada senantiasa melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga berbagai kendala dalam pencapaian kinerja dan tindaklanjutnya dapat diantisipasi dan disiapkan mitigasinya.

Realisasi pencapaian indikator kinerja Direktorat POA periode TW III Tahun 2025, ditabulasikan pada Tabel 1 berikut:



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	TRIWULAN III		
					T	R	%
1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	1	Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (nilai)	80			
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	2	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)	100	100	100	100
		3	Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (indeks)	82	60	73,33	122,22
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)	82	82	95,14	116
		5	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	100			
3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92			
		7	Indeks operasi pesawat patroli (indeks)	95	92	97,5	116
		8	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100	100

		9	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (indeks)	80			
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	10	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (indeks)	100			
		11	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (nilai)	82			
5	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat POA (%)	95			
		13	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA (indeks)	87			
		14	Nilai PM SAKIP Satker lingkup Direktorat POA (nilai)	88			
		15	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat POA (%)	100	100	100	100%
		16	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	95	100	105,23
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat POA (nilai)	80			



		18	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Direktorat POA (unit)	1			
		19	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	80			
		20	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70			

The background of the slide features three Indonesian Navy ships sailing on a deep blue sea. The ships are white with dark blue hulls and various markings. The ship in the foreground has a red stripe and the number '401' on its bow. The ship in the middle has a red stripe and the number '402' on its bow. The ship in the background has a yellow stripe and the number '403' on its bow. The ships are moving from left to right, leaving white wakes behind them. The sky is a clear, light blue.

BAB I

PENDAHULUAN



Latar Belakang

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memegang peran strategis dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Melalui fungsi pengawasan, pemerintah memastikan bahwa setiap pelaku usaha mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ini.

Seiring penguatan tata kelola, pilar pengawasan kini semakin kokoh dengan kewenangan yang mencakup pemantauan dan pengawasan, penegakan hukum, serta pemberian sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan. Dengan cakupan wewenang yang komprehensif tersebut, sistem pengawasan menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan sumber daya laut Indonesia.

Keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak lepas dari sinergi dan kinerja optimal berbagai direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Di antara jajaran tersebut, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) menempati posisi yang sangat strategis. Dengan mandat besar mencakup penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, penyiapan logistik dan operasi kapal pengawas, hingga pengoperasian armada laut dan udara serta pemeliharaan pusat kendali, peran Direktorat POA menjadi poros penting dalam mendukung efektivitas pengawasan di lapangan.

Untuk menjalankan tugas besar tersebut secara andal, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien, Direktorat POA menerapkan manajemen kinerja yang komprehensif. Proses ini melibatkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terukur, serta evaluasi menyeluruh terhadap hasil kerja yang dicapai. Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan tata kelola yang baik, Direktorat POA juga diwajibkan untuk menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran atas hasilnya.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. Dokumen ini tidak hanya menyajikan capaian kinerja selama periode berjalan, tetapi juga menjadi instrumen evaluatif yang berharga sebagai bahan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada publik.



Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Direktorat POA periode Triwulan III Tahun 2025 disusun dengan tujuan yaitu:

1.

Penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat POA kepada seluruh stakeholder dan masyarakat kelautan dan perikanan.

2.

Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat POA sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Tantangan Pengawasan Tahun 2025

Isu strategis yang menjadi tantangan Direktorat POA dalam pengendalian operasi armada, antara lain:

1. Praktik *IUU fishing* yang masih terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII). Praktik penangkapan ikan ilegal seringkali diikuti dengan aktifitas perbudakan (*slavery*) dan perdagangan orang (*people smuggling*) diperlukan koordinasi dan sinergitas dari semua pihak, antara lain: TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Ditjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Ditjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Ditjen Bea Cukai, Badan Keamanan Laut (Bakamla).
2. Pemeriksaan terhadap pemanfaatan ruang laut, kawasan konservasi, pesisir pulau-pulau kecil, pengambilan pasir laut ilegal, dan pencemaran belum optimal dilakukan oleh kapal pengawas.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan baik berupa armada operasi (kapal pengawas dan speedboat) maupun prasarana perkantoran dan fasilitas penunjang operasi pengawasan SDKP lainnya yang masih jauh dari kondisi ideal. Modernisasi armada pengawasan juga menjadi kebutuhan, saat ini armada kapal pengawas 60% sudah berumur diatas 10 tahun dengan daya jelajah yang terbatas dan kemampuan serta kehandalan dalam melakukan pengawasan di laut juga sangat terbatas sehingga perlu untuk melakukan peremajaan kapal pengawas yang baru dan lebih modern.
4. Perkembangan harga BBM dunia terus mengalami kenaikan, kondisi ini mengakibatkan hari operasi kapal pengawas terkoreksi dan menjadi berkurang dari yang direncanakan sehingga dengan kemampuan frekuensi operasi kapal pengawas tersebut maka pengawasan dilaut perlu diintegrasikan dengan VMS atau dengan operasi udara.

Tugas dan Fungsi Direktorat POA

Tugas Direktorat Pengendalian Operasi Armada berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5/PERMEN- KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Hingga triwulan III 2025, Direktorat POA dipimpin oleh seorang Direktur dengan dibantu oleh 6 (enam) Ketua Tim Kerja yaitu: (1) Tim Kerja Prasarana dan Sarana, (2) Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi dan Intelijen, (3) Pengawakan dan Logistik, (4) Pengoperasian Kapal Pengawas dan Pesawat Patroli (5) Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, (6) Subbag Tata Usaha. Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 1.

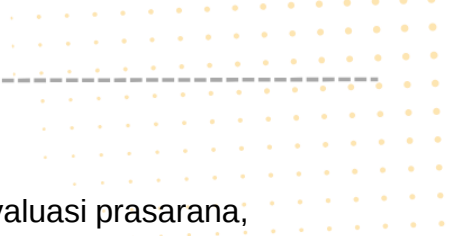
Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat POA





Adapun Direktorat Pengendalian Operasi Armada memiliki beberapa fungsi sebagai berikut

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;
2. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;
3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian



dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas; dan

5. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengendalian Operasi Armada.

Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat POA secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat POA, Ditjen. PSDKP tahun 2025 serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2025- 2029 dan perjanjian kinerja Direktorat POA tahun 2025.

Bab IV Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan selama tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat POA, Ditjen. PSDKP periode Tahun 2025 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa mendatang



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dit. POA

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil pada tahun 2025, dibuat dokumen perjanjian kinerja sebagaimana terdapat pada lampiran 1. Adapun Rincian Indikator Kinerja yang menjadi target pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Gambar 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Saiful Umam**

Jabatan : Direktur Pengendalian Operasi Armada

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Pung Nugroho Saksono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

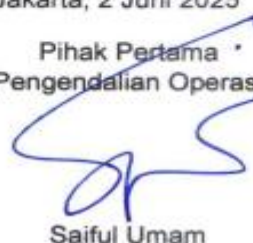
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Direktur Pengendalian Operasi Armada


Saiful Umam

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	1	Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (nilai)	80
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	2	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)	100
		3	Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (indeks)	82
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)	82
		5	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	100
3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		7	Indeks operasi pesawat patroli (indeks)	95
		8	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
		9	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (indeks)	80
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	10	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (indeks)	100
		11	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (nilai)	82
5	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber	12	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat POA (%)	95
		13	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA (indeks)	87

	daya kelautan dan perikanan	14	Nilai PM SAKIP Satker lingkup Direktorat POA (nilai)	88
		15	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat POA (%)	100
		16	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat POA (nilai)	80
		18	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Direktorat POA (unit)	1
		19	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	80
		20	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70

NO	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	249,142,299,000
SK 1.1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	
SK 1.2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	
SK 1.3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	
SK 1.4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	
SK 1.5	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	
Total Anggaran		249,142,299,000

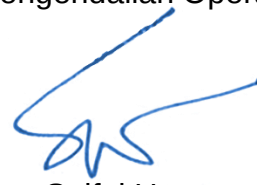
Jakarta, 2 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Direktur Pengendalian Operasi Armada



Saiful Umam

ALOKASI ANGGARAN

Dalam mendukung Indikator Kinerja tersebut, dialokasikan anggaran dalam merealisasikan Rincian Output Lingkup Direktorat POA ditabulasikan sebagai berikut:

NO	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN (000)	VOLUME
2350. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP		243,820,299	
1	RCG. 001. Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dirawat	26,683,029	12 Unit
2	QHD. 001 Operasi Kapal Pengawas (Hari Operasi)	176,070,270	31 Hari Operasi
3	QHD. 002. Operasi Pesawat Patroli (Hari Operasi)	40,000,000	140 Hari Operasi
4	FBA. 001. Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada	547,000	25 Pemerintah Daerah
5	AFA. 001. NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	220,000	1 NSPK
6	ABW. 001. Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	300,000	1 Rekomendasi
2352. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		5,322,000	
7	RDS. 001. Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	3,811,000	1 Unit
8	ACA. 001 Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	1,511,000	4000 Produk
TOTAL PAGU		249,142,299	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Direktorat POA TW III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja Direktorat POA sebesar 105,92% dengan capaian indikator Nilai Kinerja Organisasi (NKO) berwarna HIJAU dengan kategori BAIK. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana disajikan pada tabel Capaian Kinerja Organisasi berikut:

Gambar 3 Tangkapan Layar Capaian Kinerja Direktorat POA Tahun 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN e-Kinerja home Kams, 15 Oktober 2025

NKO September - 2025
 Unit Kerja : DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI RIABA
 Skor Kinerja : 105.92

• Periklan pada data dukung suatu kegiatan terakut
 • Jika masih terakut terakut, silakan klik pada update kembali dengan cara klik tombol
 • Jika masih ada data dukung terakut, data dukung masih dalam diupload dengan cara klik tombol Tambah Data Dukung

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polasasi	Perhitungan	Target 2025	Target September	Capaian September	%	Target 1st September	Capaian 1st September	%	Tgl input
BK.01	Terselenggaranya sosialisasi penyadaran masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif											
IKSK.01	Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadaran masyarakat kelautan dan perikanan	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	80.00	0.00			0.00	0.00		14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											
BK.02	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswasa secara efektif											
BK.03	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi						111.04			111.04		
IKSK.03.1	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI	%	Maximize	Rata-rata	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	100.00	14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											
IKSK.03.2	Indeks Pengukuran Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	82.00	60.00	73.33	100.00	80.00	73.33	100.00	14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											
IKSK.03.3	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Indeks	Maximize	Rata-rata	82.00	82.00	95.14	100.00	164.00	190.47	100.00	14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											
IKSK.03.4	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	Maximize	Nilai Positif Akhir	100.00	0.00			0.00	0.00		14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											
BK.04	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif						100.89			100.89		
IKSK.04.1	Indeks operasi kapal pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	92.00	0.00			0.00	0.00		14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											
IKSK.04.2	Indeks operasi pesawat patroli	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	95.00	90.00	97.93	100.00	90.00	97.93	100.00	14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											
IKSK.04.3	Persentase Pemantauan Logistik Kapal Pengawas	%	Maximize	Rata-rata	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	100.00	14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											
IKSK.04.4	Indeks Menapan Awal Kapal Pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	80.00	0.00			0.00	0.00		14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											
BK.05	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan											
IKSK.05.1	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	Indeks	Maximize	Rata-rata	100.00	0.00			0.00	0.00		14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											
IKSK.05.2	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	82.00	0.00			0.00	0.00		14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											
BK.06	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						100.87			100.87		
IKSK.06.1	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat POA	%	Maximize	Nilai Positif Akhir	95.00	0.00			0.00	0.00		14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											
IKSK.06.2	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Kelompok Direktorat POA	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	81.00	0.00			0.00	0.00		14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											
IKSK.06.3	Nilai PM BAKP Subur Kelompok Ditjen PSDKP	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	86.00	0.00			0.00	0.00		14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											
IKSK.06.4	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Kelompok Ditjen PSDKP	%	Maximize	Rata-rata	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	100.00	14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											
IKSK.06.5	Nilai Pengawasan Kelembagaan Internal Unit Kerja Kelompok Ditjen PSDKP	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	80.00	0.00			0.00	0.00		14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											
IKSK.06.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja Kelompok Direktorat POA yang dokumen tidak lengkap	%	Maximize	Rata-rata	95.00	95.00	100.00	100.00	190.00	197.96	100.00	14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											
IKSK.06.7	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja Kelompok Direktorat POA	Inovasi	Maximize	Nilai Positif Akhir	1.00	0.00			0.00	0.00		14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											
IKSK.06.8	Nilai Kinerja yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berprestasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja Kelompok Direktorat POA	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	80.00	0.00			0.00	0.00		14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											
IKSK.06.9	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	70.00	0.00			0.00	0.00		14-Oct-2025 10:28
	Tampilkan Data Dukung											

Sumber: kinerjaku.KKP.go.id, Oktober 2025

SASARAN KEGIATAN 1

TERSELENGGARANYA SOSIALISASI PENYADARTAHUAN MASYAKARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA

1. Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja “Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan” bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Peserta peserta sosialisasi khususnya peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA. Capaian Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test) yang peserta Bimtek berasal dari stakeholder atau para pemilik kapal perikanan.

Tabel 2. Target dan Realisasi IKU-1 TW III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat realisasi dikarenakan pengukuran akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Direktur POA yang tinggi dalam memastikan terlaksananya Bimtek SPKP di bidang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
2. Perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang menjadi prioritas untuk pemahaman para pemilik Kapal Perikanan dalam penggunaan Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 1 ini sebesar Rp 1.511.000.000, namun sampai dengan periode Triwulan III 2025 alokasi anggaran masih di blokir.

SASARAN KEGIATAN 2

TERSELENGGARANYA SISTEM PEMANTAUAN SDKP YANG AKURAT DAN TERINTEGRASI

2. Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI

Indikator Kinerja “Persentase Cakupan Pemantauan SDKP di WPP NRI” bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap aktivitas atau kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di WPP NRI yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kegiatan yang dipantau antara lain: Aktifitas kapal perikanan berizin pusat WPP NRI, Aktivitas kapal di kawasan konservasi, Kejadian pencemaran perairan, Pemanfaatan ruang laut dan Aktivitas kapal yang melakukan pemanfaatan sedimentasi. Direktorat POA memastikan Sistem Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memanfaatkan teknologi pemantauan antara lain: a) Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), b) *Automatic Identification System* (AIS), c) Citra Satelit, d) Air Surveillance (foto udara) dan e) SMS/WA Gateway.

Sekurang kurangnya dalam sebulan terpantau dengan salah satu kegiatan pemanfaatan SDKP menggunakan salah satu teknologi pemantauan pada WPP NRI.

Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), Ditjen PSDKP. Rincian capaian IKU 2 Direktorat POA periode Triwulan III Tahun 2025 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Target dan Realisasi IKU-3 TW III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Cakupan Pemantauan SDKP di WPP NRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, target untuk IKU 3 pada TW III dapat dicapai secara maksimal. Capaian pada periode triwulan III tahun 2025 sama dengan capaian pada tahun 2024 periode yang sama, yaitu sebesar 100%, sehingga target dapat tercapai sepenuhnya. Adapun capaian dimaksud diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Formulasi rumus perhitungan capaian Cakupan WPPNRI

Formula:

$$x = (x1/x2) \cdot 100\%$$

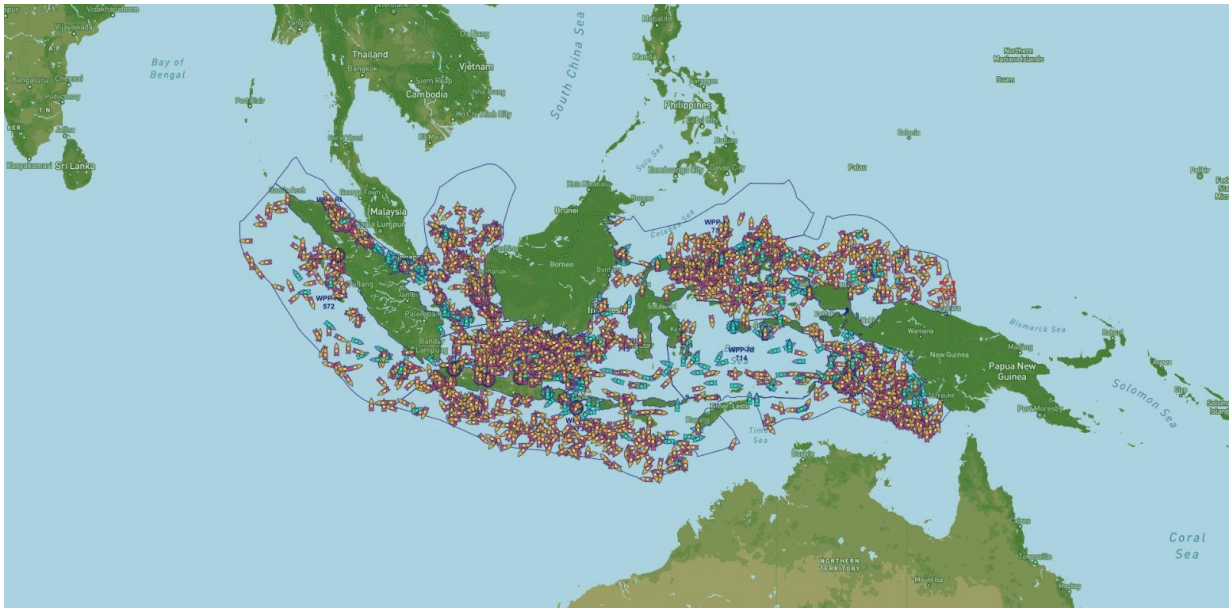
Keterangan:

x: Persentase cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%)

x1: Jumlah WPP NRI yang dipantau menggunakan teknologi pemantauan dari kegiatan pemanfaatan SDKP

x2: Jumlah WPP NRI

	X1 =	11 WPPNRI	
	X2 =	11 WPPNRI	
Capaian	TW III	=	(11/11)x 100% = 100%



Gambar 2 Ilustrasi Pemantauan menggunakan SPKP periode Triwulan III 2025



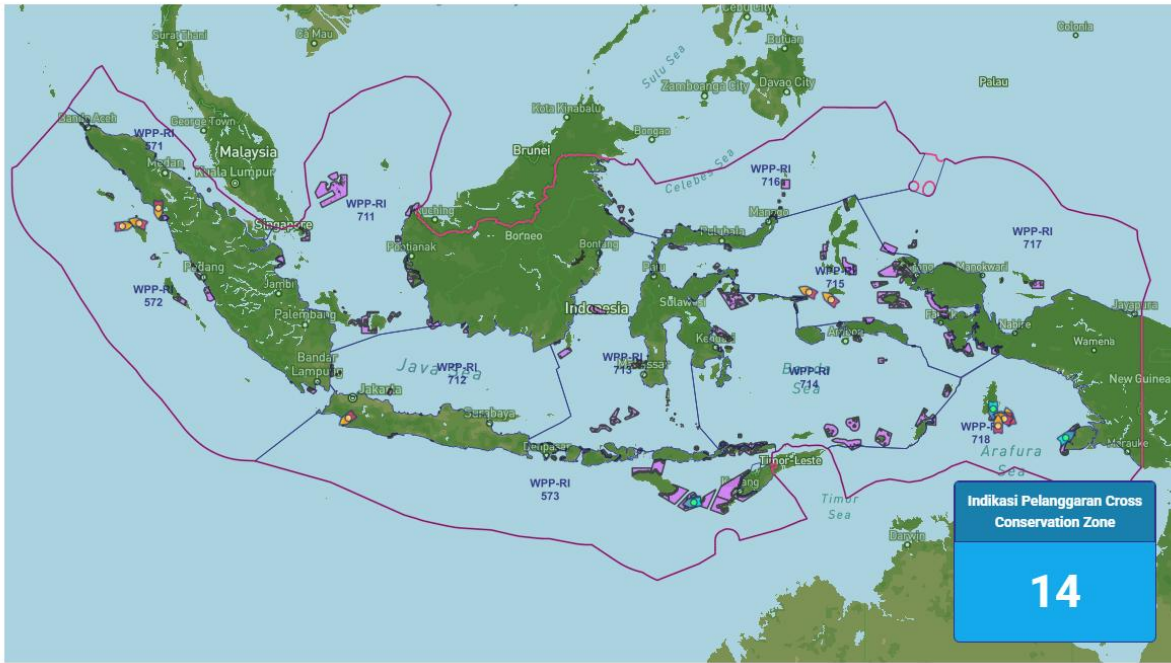
Gambar 3 Ilustrasi Pemantauan menggunakan AIS periode Triwulan III 2025



Analisa Pemantauan Kapal Perikanan

1 Juli 2025 pukul 07:00 WIB s.d 30 September 2025 pukul 07:00 WIB

SANGAT RAHASIA



Gambar 4 Kawasan Konservasi yang dipantau periode Juli - September 2025

Tabel 4 Cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%) menggunakan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)
TRIWULAN III 2025

No	Wilayah WPPNRI	Bulan			Ket
		Apr	Mei	Jun	
1	WPP NRI 571	✓	✓	✓	Terpenuhi
2	WPP NRI 572	✓	✓	✓	Terpenuhi
3	WPP NRI 573	✓	✓	✓	Terpenuhi
4	WPP NRI 711	✓	✓	✓	Terpenuhi
5	WPP NRI 712	✓	✓	✓	Terpenuhi
6	WPP NRI 713	✓	✓	✓	Terpenuhi
7	WPP NRI 714	✓	✓	✓	Terpenuhi
8	WPP NRI 715	✓	✓	✓	Terpenuhi
9	WPP NRI 716	✓	✓	✓	Terpenuhi
10	WPP NRI 717	✓	✓	✓	Terpenuhi
11	WPP NRI 718	✓	✓	✓	Terpenuhi

Tabel Cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%) menggunakan Automatic Identification System (AIS)
TRIWULAN III 2025

No	Wilayah WPPNRI	Bulan			Ket
		Apr	Mei	Jun	
1	WPP NRI 571	✓	✓	✓	Terpenuhi
2	WPP NRI 572	✓	✓	✓	Terpenuhi
3	WPP NRI 573	✓	✓	✓	Terpenuhi
4	WPP NRI 711	✓	✓	✓	Terpenuhi
5	WPP NRI 712	✓	✓	✓	Terpenuhi
6	WPP NRI 713	✓	✓	✓	Terpenuhi
7	WPP NRI 714	✓	✓	✓	Terpenuhi
8	WPP NRI 715	✓	✓	✓	Terpenuhi
9	WPP NRI 716	✓	✓	✓	Terpenuhi
10	WPP NRI 717	✓	✓	✓	Terpenuhi
11	WPP NRI 718	✓	✓	✓	Terpenuhi

3. Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP

Indikator Kinerja “Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP” bertujuan untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Direktorat POA memastikan pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan kepada pengguna hasil analisis dilakukan secara akuntabel. Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), Ditjen PSDKP. Rincian capaian IKU 3 Direktorat POA periode Triwulan III Tahun 2025 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Target dan Realisasi IKU-3 Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP	-	-	-	-	-	-	60	75	125	60	73,33	122,22	-	-	-

Pada Triwulan III, target IKU 3 berhasil dilampaui. Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan penurunan sebesar 2,78% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh tidak adanya permintaan data untuk mendukung operasi kapal pengawas dan *air surveillance* pada bulan Februari 2025. Hal tersebut berdampak pada capaian Triwulan III karena perhitungan IKU yang bersifat kumulatif dari bulan-bulan sebelumnya. Adapun indeks 73,33 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

Tabel 6. Komponen Perhitungan IKU 2

No	Indikator	Bulan									Bobot	Perhitungan (%)	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep			
1	Analisis Indikasi Pelanggaran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40	30,00	
2	Analisis Kapal di Kawasan Konservasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	15,00	
3	Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	15,00	
4	Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance	1	0	1	1	1	1	1	1	1	20	13,33	
Indeks												73,33	
												Target	60,00
												Persentase terhadap target	122,22%

Berdasarkan tabel 6 diatas, angka 1 pada capaian bulanan tersebut menunjukkan tercapainya pemenuhan data realisasi perkomponen pada IKU 4. Sedangkan angka 0 menunjukkan tidak terpenuhi data realisasi perkomponen pada IKU 4.

Indikator ini dipengaruhi oleh 4 sub indikator yaitu: Indikasi Pelanggaran, Analisis Kapal di Kawasan Konservasi, Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dan Data untuk Operasi Kapal Pengawas/Airborne Surveillance.

1. Indikasi Pelanggaran

Indikasi pelanggaran adalah sebuah analisis yang dilakukan terhadap kapal- kapal ikan yang terdaftar di dalam sistem pemantauan kapal perikanan berkaitan dengan berbagai indikasi pelanggaran pengelolaan sumber daya perikanan.

Jenis-jenis indikasi pelanggaran antara lain pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI), laut lepas, pelabuhan pangkal, Jalur Penangkapan, beroperasi di kawasan konservasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilarang. Hasil analisis tersebut lalu diterbitkan berupa lembar Indikasi Pelanggaran dan diberikan memo penyampaian setiap harinya kepada UPT terkait untuk dapat ditindak lanjuti. Untuk diketahui, sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2025, Pusdal PSDKP telah menerbitkan analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan sebanyak 1.865 kapal dengan rincian sebagaimana pada Tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian analisis pelanggaran periode Januari sd September 2025

INDIKASI PELANGGARAN SPKP								TOTAL
Bulan	DPI	DPI (laut lepas)	Jalur Penangkapan	Pelabuhan Pangkal / Muat	Poaching	Tanpa SIPI / SIKPI	Transshipment	
Jan	129	1	182	45	75	0	4	436
Feb	100	4	179	44	22	0	7	356
Mar	52	2	179	29	3	1	0	266
Apr	78	0	97	6	8	1	5	195
Mei	53	3	106	4	4	0	0	170
Jun	29	1	73	14	14	0	1	132
Jul	19	2	95	10	2	0	0	128
Agu	19	3	44	5	9	0	2	82
Sep	34	1	55	2	8	0	0	100

2. Analisis Kapal di Kawasan Konservasi

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan

sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Sesuai dengan peraturan tersebut Tim Kerja Pengendalian Sistem dan Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan pada Triwulan III Tahun 2025 dilakukan pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia dan terdapat 14 kapal berizin pusat yang terpantau melakukan indikasi kegiatan penangkapan dan/atau labuh di dalam kawasan konservasi. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi dapat dilihat dalam berikut:

Tabel 8 Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi bulan Juli 2025

NO	NAMA KAWASAN	JUMLAH
1	Kkp3k pantai penyu pangumbahan dan perairan sekitarnya di kabupaten sukabumi provinsi jawa barat	1
2	Taman nasional perairan (tnp) laut sawu dan sekitarnya di provinsi nusa tenggara timur	2
3	Suaka alam perairan (sap) kepulauan aru bagian tenggara dan laut sekitarnya di provinsi maluku	2
4	Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil kepulauan sula dan perairan sekitarnya di provinsi maluku utara	1
TOTAL		6

Tabel 9 Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi bulan Agustus 2025

NO	NAMA KAWASAN	JUMLAH
1	Kawasan konservasi di perairan di wilayah pulau kolepom provinsi papua selatan	1
2	Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil kepulauan sula dan perairan sekitarnya di provinsi maluku utara	1
3	Kawasan konservasi perairan sawo-lahewa dan perairan sekitarnya kabupaten nias utara di provinsi sumatera utara	2
TOTAL		4

Tabel 10 Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi bulan September 2025

NO	NAMA KAWASAN	JUMLAH
1	Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil morowali, morowali utara, dan perairan sekitarnya di provinsi sulawesi tengah	1
2	Kawasan konservasi perairan sawo-lahewa dan perairan sekitarnya kabupaten nias utara di provinsi sumatera utara	3
TOTAL		4

3. Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dinyatakan bahwa setiap kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing diizinkan masuk ke wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan peraturan tersebut Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan telah melakukan pemantauan terhadap kapal pengangkut ikan hidup yang terpantau aktif pada bulan Januari sd September 2025.

Tabel 11 Jumlah Pemantauan Kapal Pengangkut Ikan Hidup s.d bulan
September 2025

No	Bulan	Jumlah Kapal
1	Januari	37 Kapal
2	Februari	41 Kapal
3	Maret	39 Kapal
4	April	35 Kapal
5	Mei	36 Kapal
6	Juni	37 Kapal
7	Juli	38 Kapal
8	Agustus	38 Kapal
9	September	39 Kapal

4. Data untuk Operasi Kapal Pengawas / Airborne Surveillance

Penyiapan data kapal perikanan berdasarkan sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS) dilaksanakan dalam rangka mendukung operasi kapal pengawas dan pelaksanaan airborne surveillance. Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan penerbitan data untuk operasi kapal pengawas yang dilakukan setiap periode pemantauan.

Tabel 12 Data Sebaran Kapal Perikanan sebagai Bahan Operasi s.d bulan
September 2025

No	Bulan	Jenis Operasi	Tanggal	Wilayah Operasi	Jumlah Dokumen
1	Januari	<i>Airborne Surveillance</i> dan Operasi KP	26 Januari 2025	11 WPPNRI	1
2	Februari	<i>Airborne Surveillance</i> dan Operasi KP	-	-	0
3	Maret	<i>Airborne Surveillance</i> dan Operasi KP	20 Maret 2025	WPP NRI 711	1
4	April	<i>Airborne Surveillance</i> dan Operasi KP	8 April 2025	WPP NRI 571, 711, 712	2
			14 April 2025	WPP NRI 573, 714	
			15 April 2025	WPP NRI 716, 717	
			28 April	WPP NRI 711,	

No	Bulan	Jenis Operasi	Tanggal	Wilayah Operasi	Jumlah Dokumen
			2025	718	1
		Operasi pengawasan oleh UPT	23 April 2025	WPP NRI 714, 715	
5	Mei	<i>Airborne Surveillance</i> dan Operasi KP	6 Mei 2025	WPP NRI 573, 713	2
			7 Mei 2025	WPP NRI 714, 716, 717	
			8 Mei 2025	WPP NRI 573, 712	
			15 Mei 2025	WPP NRI 711, 712, 714, 718	
			19 Mei 2025	WPP NRI 711	
			22 Mei 2025	WPP NRI 712	
		Operasi pengawasan oleh UPT	6 Mei 2025	WPP NRI 712	1
6	Juni	<i>Airborne Surveillance</i> dan Operasi KP	3 Juni 2025	WPP NRI 572, 573, 715, 716	2
			19 Juni 2025	WPP NRI 715, 716, 717	
			24 Juni 2025	WPP NRI 573, 711, 712, 714, 715	
7	Juli	<i>Airborne Surveillance</i> dan Operasi KP	2 Juli 2025	WPP NRI 716	4
			7 Juli 2025	WPP NRI 711	
			11 Juli 2025	WPPNRI 572 dan 717	
			15 Juli 2025	WPP NRI 712	
			21 Juli 2025	WPP NRI 711, 715, 716	
			22 Juli 2025	WPP NRI 571	
			24 Juli 2025	WPP NRI 711	
			30 Juli 2025	WPPNRI 713,714,715,716	
			31 Juli	WPPNRI 711	

No	Bulan	Jenis Operasi	Tanggal	Wilayah Operasi	Jumlah Dokumen
			2025	dan 715	
8	Agustus	Airborne Surveillance dan Operasi KP	4 Agustus 2025	WPP NRI 711	3
			6 Agustus 2025	WPP NRI 712	
			7 Agustus 2025	WPPNRI 572, 573, 716, 717	
			4 Agustus 2025	WPPNRI 716	
			25 Agustus 2025	WPPNRI 711, 712	
			27 Agustus 2025	WPPNRI 714, 715 dan 718	
9	September	Airborne Surveillance dan Operasi KP	1 September 2025	WPPNRI 571, 573, 714, 715, 716,7 17	2
			8 September 2025	WPPNRI 716, 717	
			9 September 2025	WPPNRI 718	
			11 September 2025	WPPNRI 711	
			12 September 2025	WPPNRI 712	
			18 September 2025	WPPNRI 718	
Total					19

Keberhasilan pencapaian target IKU ini merupakan hasil dari terpenuhinya seluruh komponen pendukung serta pelaksanaan tugas secara optimal oleh Direktorat Pengelolaan Operasi Armada, khususnya Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi Intelijen Kapal Pengawas. Kontribusi tersebut diperkuat oleh keterlibatan pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, yang berperan penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta keberlanjutan capaian kinerja secara menyeluruh.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 3 ini sebesar Rp1,280,385,000,00 dan sampai dengan TW III tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 802,153,200,00 atau 62,65% dari alokasi anggaran.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengisian kuesioner Sistem Kepuasan Masyarakat Layanan SPKP menggunakan *digital form* pada *tools* Survei Kepuasan (Aplikasi SUSAN) KKP, dimana hasil penilaian pengguna SPKP langsung diolah secara otomatis pada Aplikasi SUSAN. Aplikasi SUSAN KKP merupakan aplikasi yang dibangun oleh Pusdatin KKP dalam rangka untuk membantu pengambilan responden dan menghitung nilai SKM yang sesuai dengan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SKM Secara Realtime. Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari indikator kuantitatif, yakni:

1. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)

Layanan penerbitan dokumen digital yang menyatakan bahwa transmitter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.

2. Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan

Dengan adanya inovasi pengajuan secara mandiri, secara otomatis Pengguna akan mendapatkan akses untuk mengajukan layanan penerbitan SKAT sekaligus dapat memantau kapal perikanan miliknya.

3. Analisis Pergerakan Kapal Perikanan

Bagi perusahaan perikanan yang memiliki keperluan khusus dalam melakukan tracking kapal perikananannya dapat mengetahui posisi pergerakan kapal perikanan yang dimiliki dengan cara mengajukan permohonan pelayanan analisis kapal perikanan kepada Direktorat Jenderal PSDKP.

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU 5 Periode TW III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)	80	92,34	115,43%	80	89,67	112,09%	81	97,05	119,81%	82	95,14	116%	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 95,14 dari target sebesar 82 sehingga persentase capaian sebesar 116%. Sejak triwulan III tahun 2025 telah dilakukan inovasi pelayanan SPKP melalui aplikasi SALMON Kilat dimana penerbitan layanan SPKP semakin mudah dan cepat, namun perlu dilakukan sosialisasi kepada pengguna layanan terkait penggunaan aplikasi SALMON Kilat tersebut, sehingga perlu dilakukan publikasi terkait mekanisme dan panduan penggunaan SALMON Kilat.

Potret hasil survei kepuasan masyarakat periode TW III Tahun 2025 berdasarkan Aplikasi SUSAN KKP sebagai berikut :

Gambar 5 Tangkapan Layar Aplikasi SUSAN KKP

Keberhasilan capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP pada triwulan III 2025 dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan SPKP sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan

2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan SPKP;
3. Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 5 ini sebesar Rp396,542,000,00 dan sampai dengan TW III tahun 2025 telah anggaran. terealisasi sebesar Rp 106,409,500,00 atau 26,83% dari alokasi

5. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Jumlah rancangan kebijakan pemerintah di bidang Pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA Tahun 2025 telah terpenuhi. Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menstandarkan pelayanan publik Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU 5 Periode TW III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan													-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian tahun 2025 telah tercapai sebesar 100% pada periode Triwulan II dengan NSPK yang dihasilkan yaitu Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 39 tahun 2025 tentang Manajemen Mutu di Lingkungan Direktorat Pengendalian Operasi Armada. Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan pelayanan di lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada.

Keberhasilan capaian IKU 5 dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

1. Tingginya komitmen Direktur POA dalam pemenuhan regulasi di

bidang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Hal ini karena pimpinan sangat memahami pentingnya/urgensi keberadaan norma, standar, pedoman dan kriteria dalam menjamin operasional sistem pemantauan SDKP berjalan sesuai kaidah dan standar yang tinggi.

2. Penetapan target NSPK yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.
3. Sebagai salah satu dokumen persyaratan pemenuhan ISO 9001:2022



Gambar 6 Pembahasan rancangan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP tentang Manajemen Mutu



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenosdkp@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
MANAJEMEN MUTU DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGENDALIAN
OPERASI ARMADA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan pelayanan lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Manajemen Mutu Di Lingkungan Direktorat Pengendalian Operasi Armada;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

Gambar 7 Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 39 tahun 2025 tentang Manajemen Mutu di Lingkungan Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Kegiatan ini merupakan bagian upaya pemenuhan standar ISO 9001 yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada, sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan ini secara langsung melekat pada anggaran pemenuhan ISO 9001.

6. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasi Kapal Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari

indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan sebanyak 4 variabel, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Objek Kelautan;
2. Cakupan Wilayah Pengawasan;
3. Tindak Lanjut Target Operasi;
4. Hasil Dukungan Operasi Lainnya.

Tabel 15. Rincian capaian IKU 6 Direktorat POA TW III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)							87,6	96,19	109.8%	70	95,12	135,88	-	-	-	89	95,12	106.8%

Pengukuran capaian kinerja operasi kapal pengawas akan dilaksanakan pada TW IV 2025 dengan target indeks kinerja operasi kapal pengawas pada tahun 2025 adalah sebesar 92. Sampai dengan TW III 2025, hanya dilakukan update capaian kegiatan operasi Kapal Pengawas yang telah melaksanakan operasi.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan di akhir tahun disebabkan oleh adanya dinamika perubahan kebijakan negara terkait alokasi anggaran sehingga mengubah strategi operasi dan proyeksi ketidakpastian di masa mendatang, yang berdampak pada hasil operasi kapal pengawas yang masih terbatas. Dengan demikian, pengukuran kinerja secara menyeluruh baru dapat dilakukan pada akhir tahun TW IV 2025, meskipun target dan spesifikasi kinerja yang ditetapkan masih tetap berlaku.



Gambar 8. Kegiatan Menghentikan, Memeriksa dan Menahan (henrikhan)

Kapal Ikan Asing oleh Kapal Pengawas

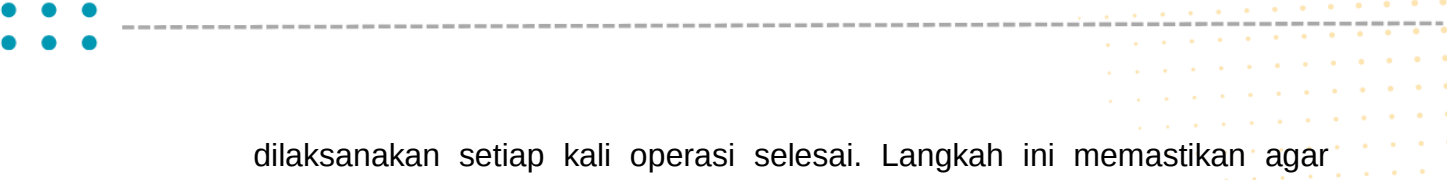
Adapun sampai dengan periode TW III Tahun 2025, Kapal Pengawas telah melaksanakan Operasi Mandiri sebanyak 492 hari operasi yang melibatkan 10 unit Kapal Pengawas, dengan rata-rata hari operasi untuk setiap kapal pengawas adalah 49,2 hari. Selama periode ini, Kapal Pengawas berhasil memeriksa sebanyak 1085 kapal (1074 Kapal Ikan Indonesia/KII dan 11 Kapal Ikan Asing/KIA). Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 116 kapal (109 KII dan 7 KIA) berhasil ditangkap.

Tabel 16. Hasil Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP sampai dengan TW III Tahun 2025

NO	NAMA KAPAL PENGAWAS	HARI OPS	DIPERIKSA			DITANGKAP		
			KII	KIA	JML	KII	KIA	JML
1	KP. ORCA 01	19	112	0	112	25	0	25
2	KP. ORCA 02	77	150	0	150	10	0	10
3	KP. ORCA 03	40	121	4	125	1	2	3
4	KP. ORCA 04	66	71	3	74	4	2	6
5	KP. ORCA 05	66	217	0	217	58	0	58
6	KP. ORCA 06	61	59	1	60	0	1	1
7	KP. BARAKUDA 01	15	27	1	28	4	1	5
8	KP. BARAKUDA 02	47	155	1	156	2	0	2
11	KP. PAUS 01	64	145	1	146	2	1	3
12	KP. AKAR BAHAR 01	37	17	0	17	3	0	3
JUMLAH TOTAL		492	1074	11	1085	109	7	116

Dalam pelaksanaan operasi Kapal Pengawas Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Terdapat kendala berupa beberapa kapal pengawas yang belum dapat beroperasi optimal akibat kendala teknis seperti proses docking, perbaikan mesin utama dan mesin bantu yang berdampak pada capaian hari operasi, riksa dan tangkapan. Ke depan, optimalisasi akan difokuskan pada percepatan operasional kapal pascaperbaikan, serta pengawasan berbasis prioritas terhadap wilayah dan objek sumber daya kelautan berisiko tinggi.
2. Optimalisasi penggunaan anggaran operasi kapal pengawas menjadi prioritas utama. Pelaksanaan operasi diupayakan agar berjalan seefektif dan seefisien mungkin dengan dukungan logistik yang memadai sesuai rencana operasi. Pemanfaatan listrik darat (shore power) pada kapal pengawas turut mendukung efisiensi operasional, karena dapat menekan penggunaan bahan bakar selama kapal sandar. Efisiensi ini berdampak langsung pada peningkatan hari operasi kapal pengawas serta memperbesar capaian kegiatan pemeriksaan (riksa) di lapangan.
3. Kegiatan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan operasi kapal pengawas telah



dilaksanakan setiap kali operasi selesai. Langkah ini memastikan agar operasi kapal pengawas dapat berjalan lebih efektif dan efisien di periode berikutnya.

4. Pengukuran Kinerja Indeks Operasi Kapal Pengawas akan dilaksanakan pada akhir tahun TW IV 2025, setelah pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas berjalan.
5. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap progress capaian operasi kapal pengawas terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai target yang ditetapkan.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 8 ini Rp176.070.270.000,00 dan sampai dengan TW III Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp130.786.615.143,00 atau 77,01% dari total pagu.

7. Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli

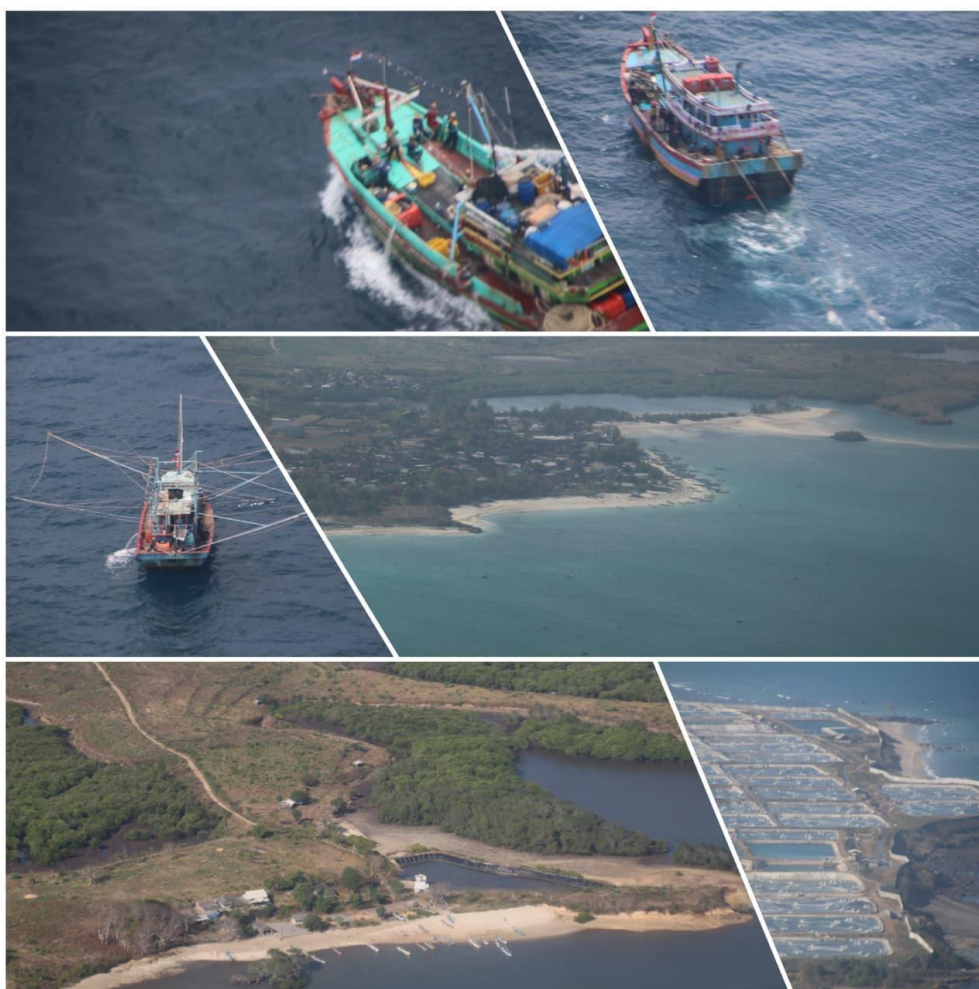
Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Pesawat Patroli agar terwujudnya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif. Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi;
6. Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717);
7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi;
8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Terkoordinasi Regional, Nasional dan Internasional;
9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Kedinasan Menteri Kelautan dan Perikanan).

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU 5 Periode TW III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021/2			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	-	-	-	93	98,53	106%	91	100	109,9%	92	97,5	105,98	-	-

Berdasarkan data pada Tabel 10, Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi indeks kinerja tercatat sebesar 97,5, melampaui target sebesar 92, dengan persentase capaian mencapai 105,98%.



Gambar 9. Dokumentasi Kapal Perikanan dan Objek SDK yang Dipantau Oleh Operasi Pesawat Patroli

Capaian positif ini mengindikasikan bahwa target operasional pesawat patroli telah tercapai secara maksimal. Keberhasilan ini didukung oleh tercapainya target-target spesifik dalam operasi patroli, meliputi:

- Jumlah kapal perikanan yang dipantau sesuai target.
- Luas area pengawasan (*coverage area*) yang sesuai target.
- Jumlah hari operasi yang terealisasi sesuai target.
- Tindak lanjut yang efektif terhadap target operasi yang diberikan.
- Jumlah kapal yang berhasil divalidasi sesuai target.
- Pemberian dukungan pengawasan kawasan konservasi, pemantauan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang optimal.
- Pelaksanaan operasi terkoordinasi Jawline Arafura TA 2025

Selama periode operasi TW III Tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 19 (sembilan belas) periode operasi dengan total jumlah hari operasi sebanyak 107 hari operasi. Adapun hasil capaian operasi Pesawat Patroli sampai dengan TW III adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian Wilayah dan Hari Operasi sd. Triwulan III 2025

No	Periode	WPP	Hari Ops
1	I	711, 712, 713, 573, 572	7
2	I-A	711, 712	6
3	II	712	5
4	II-A	716, 717, 715	10
5	III	572, 711, 573	4
6	III - A	712, 713, 573	4
7	IV	712	1
8	IV-A	711, 712, 573	3
9	V	712, 713, 715, 716	3
10	V-A	716, 717, 715, 712	5
11	V-B	712, 711	7
12	VI	573, 717, 716, 712	11
13	VI-A	712	4
14	VII	712	1
15	VII-A	712, 711, 573	11
16	VIII-A	711, 712, 713, 714, 715 dan 716	10
17	VIII-B	711	2

18	IX	711	2
19	IX-A	571, 711, 712, 713, 714, 715, 716 dan 573	11
JUMLAH			107

Dalam pelaksanaan operasi Pesawat Patroli Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Pelaksanaan patroli udara hingga Triwulan III mengalami hambatan akibat adanya blokir anggaran sebesar Rp17,3 miliar dari total alokasi Rp40 miliar. Sebagai tindak lanjut, telah diajukan usulan tukar blokir anggaran sebesar Rp16,2 miliar untuk menambah sekitar 50 hari operasi tambahan guna memperkuat *integrated surveillance* antara pesawat patroli dan kapal pengawas, khususnya di wilayah rawan IUU Fishing.
2. Penyusunan rencana operasi pesawat patroli perlu memperhatikan wilayah dan jam operasi pesawat patroli untuk mencapai coverage area yang ditetapkan karena selain memprioritaskan wilayah dengan potensi kerawanan tinggi, operasi pesawat pada WPPNRI yang lain juga menjadi faktor pengukuran terkait cakupan/coverage area;
3. Perlunya memperhatikan pergerakan pesawat patroli dilaksanakan pada wilayah-wilayah prioritas dengan indikasi kerawanan sedang dan tinggi khususnya di di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA sehingga meningkatkan capaian kinerja operasi;
4. Perlu ditingkatkan pengawasan terhadap wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan kawasan konservasi dengan memperhatikan prioritas objek sumber daya kelautan (SDK) yang memiliki nilai strategis, potensi kerawanan tinggi, atau indikasi tekanan pemanfaatan berlebih.
5. Pemanfaatan data dan informasi dari Pusat Pengendalian Ditjen PSDKP (Command Center), serta informasi dari sumber yang relevan yang mendukung operasi pengawasan SDKP melalui udara.

Alokasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 7 ini sebesar Rp40.000.000.000,00 (Nilai Blokir dan Efisiensi Rp. 17.300.204.000,-) dan sampai dengan TW III tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 22.440.071.232,- atau 99,47% dari alokasi anggaran.

Selain itu Pesawat Patroli juga dilaksanakan dalam hal Dukungan Operasi Pesawat Patroli dalam rangka Integrated Surveillance System dengan Kapal Pengawas yang berasal dari Anggaran Operasi Kapal Pengawas dengan nilai sebesar Rp20.000.000.000,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp19.359.988.763,00 atau 96,80% dari alokasi anggaran.

8. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

Indikator ini digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas dalam mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik dimaksud meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personel. Logistik kapal terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas, sementara itu logistik personel terdiri dari : Bahan Makanan, Air Tawar, Alat-alat Pelayanan (ATK dan Bahan Komputer), dan senjata api. Capaian TW III tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU 9 Periode TW III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada Tahun 2025 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan tahun 2023 maka capaian realisasi relatif sama. Sementara itu, tidak terdapat target pada Renstra 2022-2025. Adapun rincian capaian setiap komponen adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Target dan Realisasi IKU 8 Periode TW III Tahun 2025

No	Komponen	Target	Realisasi	%
1	Pemenuhan Kebutuhan BBM (30%)	30%	30%	100
2	Pemenuhan Kebutuhan Pelumas (20%)	20%	20%	100
3	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP (25%)	25%	25%	100
4	Pemenuhan Kebutuhan Air Tawar (15%)	15%	15%	100
5	Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan (5%)	5%	5%	100
6	Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (5%)	5%	5%	100
	Total Nilai	100	100	100

Kegiatan pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengisian bahan bakar sesuai dengan jadwal pengajuan BBM kapal pengawas, melaksanakan pemenuhan bahan makanan/natura, air bersih, minyak pelumas, alat - alat pelayanan dan pelaporan senjata api tepat waktu sesuai dengan periode triwulanan yang telah di tetapkan;



2. Pemenuhan minyak pelumas mesin induk / mesin bantu dalam rangka menjaga mesin tetap terjaga kualitasnya. Berikut kegiatan penyediaan logistik minyak pelumas Kapal Pengawas sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya Minyak Pelumas KP. Orca 01 sebanyak 3 drum dan 10 Pail yang diterima di Pelabuhan Nizam Zachman;
- b. Terpenuhinya Minyak Pelumas KP. Orca 05 sebanyak 32 drum dan 3 Pail yang diterima di Pelabuhan Bungus Kota Padang Sumatera Barat;
- c. Terpenuhinya Proses pengajuan pembayaran Pembelian Minyak Pelumas KP. Orca 01 di Muara Baru sebanyak 3 drum;
- d. Terpenuhinya Minyak Pelumas KP. Paus 01 di Sorong sebanyak 10 pail dan Coolant sebanyak 4 pail;
- e. Terpenuhinya Minyak Pelumas KP. Orca 04 sebanyak 10 drum dan 10 Pail yang diterima di Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung;
- f. Terpenuhinya Proses pengajuan pembayaran Pembelian Minyak Pelumas KP. Paus 01 di Pelabuhan Perikanan Sorong sebanyak 10 pail dan water Coolant sebanyak 4 pail;
- g. Terpenuhinya Minyak Pelumas KP. Barakuda 02 sebanyak 17 pail (20 liter) yang diterima di Dermaga Pelabuhan Perikanan Indonesia Galala Ambon;
- h. Terpenuhinya Minyak Pelumas KP. Orca 01 sebanyak 2 drum (209 liter) yang diterima di Dermaga Pelabuhan Nizam Zachman di Muara Baru



3. Kegiatan penyediaan logistik personel meliputi pemenuhan logistik bahan makanan dan pemenuhan logistik air bersih pada 10 Kapal Pengawas lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada;



4. Kegiatan penyediaan logistik personel meliputi pemenuhan logistik pemenuhan logistik air bersih pada 10 Kapal Pengawas lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada



5. Melakukan Monitoring dan Verifikasi Laporan Bulanan Amunisi sebanyak 34 Kapal Pengawas. Adapun output yang dihasilkan tercapainya Dokumen Laporan bulanan Rekapitulasi Amunisi sebanyak 34 Kapal Pengawas lingkup Ditjen PSDKP. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan pengendalian pencatatan Barang Milik Negara (BMN) di lingkup Ditjen PSDKP terkait dengan barang persediaan amunisi (peluru)

yang bertujuan :

- a. Mengetahui stok terkini persediaan barang secara berkala;
- b. Memudahkan perhitungan pada laporan keuangan;
- c. Meminimalkan risiko kehilangan barang baik akibat kelalaian;
- d. Untuk menghasilkan data yang akurat sesuai antara pembukuan dengan stok fisik di lapangan; dan
- e. Memudahkan pengambilan keputusan saat terdapat barang rusak ataupun tidak layak .

Keberhasilan mencapai target IKU pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Komitmen dari Direktur Pengendalian Operasi Armada dalam kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, baik mendukung penangkapan ikan terukur berbasis kuota maupun operasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna menertibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan bisa Lestari. Untuk mendukung kegiatan tersebut Direktorat POA memaksimalkan ketersediaan logistik Kapal Pengawas;
2. Ditjen PSDKP telah menerapkan kebijakan pemanfaatan listrik darat sebagai sumber energi utama saat kapal sandar di dermaga, sehingga konsumsi BBM untuk keperluan stasioner dapat dialihkan menjadi hari operasi;
3. Pemantauan manajemen risiko dengan cara mengawasi dan memantau risiko secara terus menerus serta melakukan tinjauan berkala terhadap efektivitas strategi pengelolaan risiko; dan
4. Optimalisasi penggunaan Sistem Pengendalian Logistik (SIGOTIK).

Total anggaran BBM Kapal Pengawas per 30 September 2025 sebesar Rp.128.816.243.000 dengan pagu efektif Rp.105.125.301.000 dan realisasi sebesar Rp.68.304.415.000 dengan rincian sebagai berikut.

NO	RUPIAH MURNI (RM) (Rp.)	PNBP AKTIP (63,16%) (Rp.)	PNBP BLOKIR (36,84%) (Rp.)	TOTAL PAGU EFEKTIF (Rp.)	TOTAL PAGU (Rp.)
1	64.514.301.000	40.611.000.000	23.690.942.000	105.125.301.000	128.816.243.000
2	REALISASI			68.304.415.000	68.304.415.000
3	SISA			36.820.886.000	60.511.828.000

9. Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas

Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (AKP) merupakan ukuran kesiapan ASN AKP (Kelas I – IV) berdasarkan kualifikasi pendidikan, sertifikat keahlian pelaut, sertifikat keterampilan pelaut, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (MCU), dan psikotest pemegang senjata api, dalam melaksanakan tugas sesuai jenjang Jabatan dan Ke las Kapal Negara.

Berdasarkan data *Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (AKP)* tahun 2024, hasil analisa terhadap empat aspek utama yaitu pendidikan, keahlian, keterampilan kepelautan, dan hasil pemeriksaan kesehatan (MCU), menunjukkan gambaran umum kesiapan personel dalam mendukung operasi pengawasan laut. Dari sisi **pendidikan**, mayoritas AKP telah memenuhi kualifikasi minimum bidang kelautan/perikanan, yang mencerminkan kesiapan dasar dalam aspek akademik dan teknis dengan nilai 180,5. Hal ini menjadi pondasi penting dalam mendukung tugas-tugas strategis pengawasan sumber daya kelautan

Pada aspek **keahlian dan keterampilan kepelautan**, terlihat bahwa sebagian besar personel telah memiliki sertifikasi keahlian. Hal ini mencerminkan kompetensi yang cukup baik dalam penguasaan teknis operasional kapal dan pemahaman terhadap prosedur keamanan dan keselamatan di laut dengan capaian nilai pada keahlian kepelautan 72,4 dan nilai keterampilan kepelautan 25,33. Namun demikian, masih terdapat disparitas nilai antar individu yang mengindikasikan perlunya pemerataan dan peningkatan kualitas pelatihan.

Pelaksanaan kegiatan **Medical Check Up (MCU)** bagi awak kapal negara merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga kesiapan dan ketahanan personel dalam mendukung tugas operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Hingga saat ini, pelaksanaan MCU baru dapat dilaksanakan pada **KP Hiu 04, KP Hiu Macan 03, dan KP Hiu 13**. Dari hasil kegiatan tersebut, tercatat peningkatan nilai indeks kesehatan hanya sebesar **3,9 poin** dari nilai maksimal, menunjukkan bahwa pelaksanaan yang terbatas ini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan secara menyeluruh.

Rincian capaian IKU 10 Direktorat POA periode TW III Tahun 2025 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 21. Target dan Realisasi IKU 9 Periode TW III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Pendidikan yang menjadi salah satu komponen penilaian pada IKU indeks kesiapan AKP saat ini terkendala oleh anggaran, sehingga tim kerja pengawakan saat ini sudah mengusahakan dengan pembiayaan Pendidikan oleh pihak ketiga atau sponsor dan AKP yang akan melaksanakan Tugas Belajar sudah mulai masuk kampus tanggal 24 Juli 2025.. Pemeriksaan Kesehatan bagi AKP yang terdampak oleh efisiensi anggaran dan baru dibuka pada semester II saat ini sedang berproses untuk kontrak dengan pihak ketiga (penyedia layanan kesehatan). Untuk saat ini tim kerja pengawakan armada pengawasan sedang berusaha melaksanakan kegiatan pelatihan menembak bagi Awak Kapal Pengawas untuk penerbitan Kartu Pengpin guna mendukung IKU Kesiapan Awak Kapal Pengawas.

10. Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran (indeks) yang digunakan untuk menilai kualitas kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan yang telah dilakukan sehingga kapal pengawas dapat dinyatakan "Laik Operasi". Indeks kualitas dimaksud di atas didapatkan berdasarkan laporan hasil survey penilaian kondisi teknis kapal pengawas yang dilakukan oleh surveyor dari SBU Marine Service PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang menyatakan sebuah kapal pengawas yang telah disurvey masuk dalam kategori "Laik Operasi" atau "Tidak Laik Operasi".

Adapun capaian IKU Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP sampai dengan TW III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Target dan realisasi IKU 10 pada periode TW III tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan (Indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Sampai dengan periode Triwulan III 2025 indikator tersebut belum ada capaian, hal ini dikarenakan kegiatan survei penilaian kondisi teknis kapal pengawas oleh BKI direncanakan akan dilaksanakan pada periode Triwulan ke IV 2025 dan direncanakan dimulai mulai bulan Oktober 2025. Meskipun demikian, pada Triwulan III ini telah mulai dilaksanakan perencanaan kegiatan melalui pertemuan dengan SBU Marine Service PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Pertemuan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 9 September 2025 di Ruang Rapat Direktorat POA untuk membahas beberapa hal antara lain mekanisme pengadaan pekerjaan penilaian kondisi teknis kapal pengawas melalui e-Purchasing, rincian biaya dan lokasi pelaksanaan survei. Pada tahun 2025 Direktorat POA berencana akan melakukan penilaian kondisi teknis pada 8 (delapan) unit kapal pengawas dibawah kendali Direktorat POA, sesuai dengan arahan dari Biro Umum dan PBJ KKP pekerjaan tersebut akan diadakan dengan metode e-Purchasing melalui website inaproc (e-katalog) karena prosesnya lebih mudah dan cepat.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut hasil pertemuan dengan BKI, direncanakan pada Bulan Oktober akan dilaksanakan survei penilaian kondisi teknis di 4 (empat) unit kapal pengawas yaitu KP Orca 01, KP Orca 03, KP Orca 06 dan KP Barakuda 01.

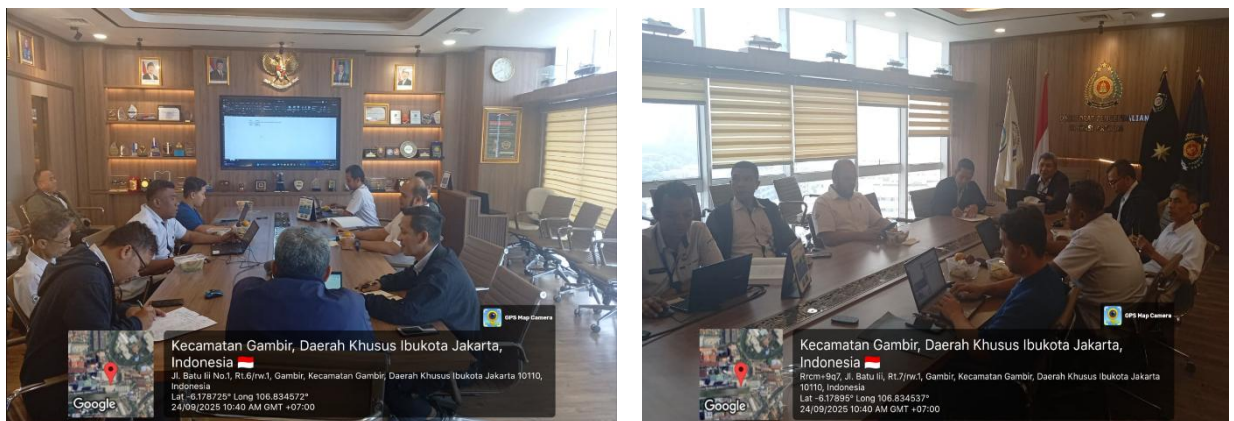


Gambar 11. Rapat pembahasan survei penilaian kondisi teknis KP dengan PT BKI

Survei penilaian kondisi teknis oleh BKI terhadap kapal pengawas yang berada dibawah kendali Direktorat Pengendalian Operasi Armada dilakukan dengan menggunakan metode *Condition Assessment Programme* (CAP), yaitu sebuah program penilaian kondisi kapal yang meliputi beberapa aspek seperti aspek konstruksi, permesinan, propulsi dan sistem pendukung lainnya dimana hasil penilaian kondisi kapal pengawas tersebut akan disajikan dalam format CAP *Grading* yang terbagi dalam 4 kategori dengan persentase nilai teknis yang berbeda-beda, dimana persentase nilai teknis tertinggi yaitu 95 - 100% dengan predikat "Very Good".

Selain kegiatan tersebut di atas, pada periode Triwulan ke III khususnya pada bulan September telah dilaksanakan pula persiapan kegiatan docking kapal pengawas untuk menjaga armada agar tetap laik dan siap operasi serta mempersiapkan kapal agar pada saat penilaian kondisi dapat mencapai nilai yang maksimal.

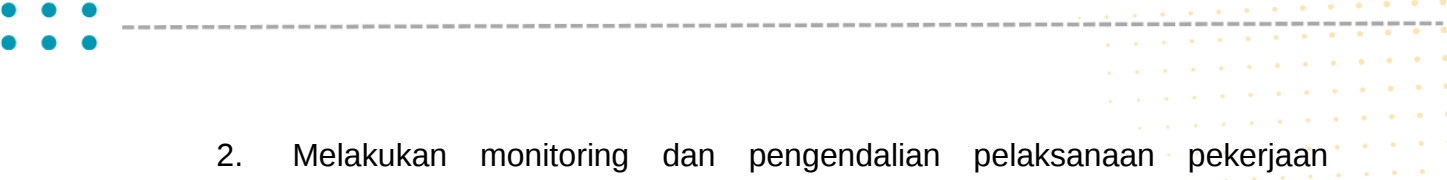
Kegiatan persiapan docking dalam bentuk pertemuan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 di ruang rapat Hiu Macan Direktorat POA. Rapat dimaksud dilaksanakan setelah selesainya proses pemilihan penyedia pekerjaan Docking Kapal Pengawas Orca 01 dan terbitnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa nomor 901/KPA.1-PSDKP/IX/2025 tanggal 23 September 2025 yang menetapkan PT. Tesco Indomaritim sebagai pemenang tender. Hal-hal yang dibahas dalam rapat dimaksud antara lain yaitu tanggal mulai dan berakhirnya kontrak, durasi pelaksanaan pekerjaan, klausul-klausul dalam kontrak yang dianggap penting dan perlu diperjelas, serta hal-hal lain terkait dengan Docking KP Orca 01 yang berkembang dalam rapat.



Gambar 12. Pertemuan persiapan docking KP Orca 01 dengan PT. Tesco Indomaritim

Dalam rangka mencapai target IKU 10, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan oleh Direktorat POA diantaranya yaitu:

1. Menyusun jadwal perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas yang terdiri dari perawatan pencegahan, perawatan prediktif, dan perawatan darurat secara efisien, efektif, dan berkesinambungan.

- 
2. Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas dengan pelaksana pekerjaan secara berkala.
 3. Menyusun dokumen manajemen risiko, mengimplementasikan, dan melakukan pemantauan risiko terhadap kegiatan perawatan.
 4. Menurunkan tim supervisi kegiatan perawatan secara berkala untuk melakukan pemantauan hasil perawatan dan memvalidasi detail pekerjaan di lapangan.
 5. Senantiasa berkonsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkait akuntabilitas pelaksanaan dan monitoring kegiatan perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas.

Alokasi anggaran pada tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 10 ini sebesar Rp.304.000.000,00 dan sampai dengan akhir TW III tahun 2025 belum ada realisasi.

11. Nilai Supervisi Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

Nilai Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran untuk mengukur kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PSDKP, supervisi dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada selaku pembina kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas di UPT.

Hasil pelaksanaan supervisi akan dituangkan dalam sebuah laporan hasil supervisi yang memuat informasi tentang evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas yang telah diselesaikan oleh UPT dengan pedoman pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas dan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas.

Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan jumlah kegiatan supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan SDKP di UPT. Metode pelaksanaan supervisi dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu secara langsung dengan melakukan kunjungan ke lokasi kapal/UPT atau secara tidak

langsung/daring dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti telepon, aplikasi chatting WhatsApp ataupun melalui aplikasi teleconference seperti Zoom Meeting dan Google Meet.

Capaian IKU 11 Nilai Supervisi Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan sampai dengan TW III tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 23. Target dan realisasi IKU 11 pada periode TW III tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada Triwulan III ini belum ada capaian untuk IKU 11, hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP direncanakan akan dimulai pada awal Triwulan IV.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai target realisasi IKU 11 antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan jadwal supervisi yang tepat dan akurat sesuai kebutuhan.
2. Koordinasi yang baik dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kapal Pengawas.
3. Metode pelaksanaan supervisi yang efektif dan efisien.
4. Monitoring dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP secara berkala, rutin, dan tepat waktu.

Sedangkan salah satu faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan supervisi dan pencapaian IKU 11 yaitu rendahnya validasi dan verifikasi data hasil supervisi secara online, hal ini disebabkan karena Direktorat POA tidak bisa melakukan validasi dan verifikasi data secara langsung di lapangan sebab tidak tersedianya anggaran.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU 11 ini yaitu sebesar Rp.245.700.000,00 dan sampai dengan akhir TW III tahun 2025 belum ada realisasi karena anggaran masih diblokir dalam rangka efisiensi.

SASARAN KEGIATAN 6

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, LINCAH DAN AKUNTABEL DALAM PENGAWASAN SDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 diukur dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

12. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA

IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Direktorat POA. Realisasi anggaran yang tinggi juga sejalan dengan tingginya capaian output Direktorat Pengendalian Operasi Armada. Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa:

- Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;
- Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel, dan Meminimalisir Deviasi halaman IV DIPA.

Tabel 25. Target dan realisasi IKU 12 periode TW III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Target realisasi anggaran Direktorat POA Tahun 2025 sebesar 95%, dan sampai dengan Triwulan III 2025 telah terealisasi sebesar 65,62%. Namun demikian Pengukuran untuk indikator ini akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2025.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal capaian Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada;
- Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran; dan
- Membuat rencana penarikan dana serta proyeksi penyerapan.
- Memastikan bahwa pagu blokir anggaran pada Direktorat POA yang bersifat permanen agar dikembalikan ke BA BUN sehingga realisasi anggaran dapat tergambar secara riil sesuai dengan pagu efektif

13. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Profesional ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

- ◆ Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)
- ◆ Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:

Pejabat Struktural:

DIKLAT PIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) DIKLAT 20 JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)

Pejabat Fungsional Tertentu:

DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)

Pejabat Fungsional Umum/ Staf:

DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)

ASN Struktural :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
ASN Fungsional :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
ASN Staff:
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)

Tabel 26. Target dan Realisasi IKU-17 Periode TW III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Triwulan III Tahun 2025 tidak ada realisasi, Karena pengukuran dilakukan pada periode Triwulan IV 2025..

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Direktur POA sangat fokus dalam hal pemenuhan nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA;
2. Kesadaran yang tinggi pegawai Dit POA dalam pengembangan diri yang dilakukan secara daring maupun luring; dan
3. Pemenuhan IP ASN yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

14. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB

melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/Daerah.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP.

Tabel 27. Target dan realisasi IKU 14 periode TW III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan III 2025 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2025.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- ◆ Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal capaian nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengendalian Operasi Armada; dan
- ◆ Melakukan penilaian mandiri pada Lembar Kerja Evaluasi, dan memenuhi data dukung yang sudah ditetapkan.

15. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA

- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan

pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

- Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (IV) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.
- Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Tabel 28. Target dan Realisasi IKU 15 Periode TW III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	100	100	100%	100	100	100%	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada TW III Tahun 2025 telah berhasil dengan maksimal sesuai target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2024, capaian relatif sama dengan persentase 100%.

Pada Direktorat POA terdapat 13 (tiga belas) kegiatan yang menjadi prioritas pengendalian berbasis Manajemen Risiko antara lain:

Tabel 29 Daftar Kegiatan yang dikendalikan berbasis Manajemen Risiko

NO	RO	DAFTAR KEGIATAN
1	ABW	Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2	ACA	Pelaksanaan Pelayanan Publik SKAT
3	AFA	Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Kriteria
4	BKB	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipantau
5	BKB	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
6	FBA	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada
7	QHD1	Operasi Kapal Pengawas
8	QHD1	Penggunaan Anggaran PNPB
9	QHD2	Operasional Pesawat Patroli
10	RCG	Armada Pengawasan SDKP yang dirawat
11	RDS	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional
12	-	Pengadaan KP PHLN
13	-	AKP PHLN

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA; dan
2. Pemantauan Pengendalian Manajemen Risiko yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

16. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

IKU ini menunjukkan Persentase Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat POA berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPSDKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni

kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 30. Target dan realisasi IKU 16 periode TW III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	70	70	100	75	100	133,33	80	100	125	95	100	105,26	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” bila dibandingkan dengan Tahun 2024 realisasi capaian sama yaitu 100% atau semua sudah terselesaikan. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen pimpinan untuk menyelesaikan penindaklanjutan rekomendasi hasil pengawasan dengan melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut dari rekomendasi yang ada.

17. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat POA

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi :

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau mewakili nilai guna kesejarahan.

Tabel 31. Target dan realisasi IKU 17 periode TW III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan III 2025 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2025.

Keberhasilan dalam mencapai target IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Komitmen pimpinan dalam mengembangkan SDM Arsiparis Dit POA agar terciptanya Arsiparis yang dinamis.
- Rapat monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan;

18. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Indikator ini merupakan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Tabel 32. Target dan realisasi IKU 18 periode TW III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, sampai dengan akhir Triwulan III 2025, belum ada capaian, pengukuran dilakukan pada triwulan IV 2025.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam ide/gagasan baru untuk selalu membuat inovasi tahunan agar kinerja menjadi lebih baik dari sebelumnya; dan
2. Melakukan rapat internal untuk pelaksanaan pembuatan inovasi perubahan setiap tahunnya.
3. Melakukan tahapan-tahapan penunjang dalam menggali ide/gagasan agar sesuai dengan kebutuhan.

19. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Direktorat POA

Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar komponen penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMENPAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 33. Target dan realisasi IKU 19 periode TW III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan III 2025 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2025.

Keberhasilan dalam mencapai target IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Komitmen pimpinan untuk mengawal dan memenuhi persyaratan agar Direktorat POA mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
- Rapat monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan;

20. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen PSDKP diperoleh dari:

- ◆ Rata-rata nilai LKE pelaksanaan Budaya Kerja Seluruh Satker Pusat (5 Satker) dan Satker UPT (14 Satker)
Nilai LKE yang digunakan adalah nilai tanpa dikonversi ke persentase

- ◆ Target nilai Satker Pusat minimal 21 yang akan diukur pada triwulan IV
- ◆ 2025

Tabel 34. Rincian target dan realisasi IKU 20 periode TW III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan III 2025 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2025.

Pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada sesudah adanya penerapan program budaya kerja telah terjadi perubahan pola pikir dan cara kerja melalui budaya kerja yang diarahkan untuk menghasilkan inovasi pada setiap area perubahan, karena terdapat lingkungan strategis yang berubah menghasilkan terobosan dalam melakukan kegiatan. Langkah implementasi 11 (sebelas) program budaya kerja pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada yang mendukung dalam pencapaian IKU Implementasi Budaya Kerja adalah:

- Hasilkan Inovasi Satker (HIU) : Melakukan asistensi kepada untuk menghasilkan inovasi pada lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada
- Lima Menit Sebelum Jadwal Rapat : Mencantumkan pada surat undangan agar peserta hadir 5 (lima) menit sebelum rapat
- Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R): Melakukan internalisasi budaya 5R agar ruang kerja lebih rapih
- Upayakan Data Terkini (UPDATE) : Pada saat rapat pimpinan terdapat unit kerja yang menyampaikan paparan dengan menggunakan data pengawasan atau data penangkapan kapal ilegal yang periode lampau, maka dengan adanya program ini tiap pegawai telah melakukan usaha terkini untuk mendapatkan data yang UPDATE.
- Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA) : Pada saat kegiatan temu teknis aparat penegak hukum terdapat agenda yang belum rapi terjadwal, notulen dan pendokumentasian yang masih berantakan, dengan adanya program ORCA kegiatan menjadi lebih komprehensif melalui pencatatan dan pengarsipan notula.
- Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT) : Dalam pelaksanaan tugas adanya potensi untuk melakukan korupsi, menerima suap, menerima gratifikasi dan mengambil kebijakan yang bertentangan



dengan hukum, maka dengan adanya program TAAT ini telah mewujudkan pegawai yang berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas sehingga menjaga nama baik organisasi dan kepercayaan publik

- Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA) : Pada saat penyusunan anggaran terdapat kesan dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tidak sesuai ketentuan, maka dengan adanya program BARRAKUDA ini tiap pegawai telah merencanakan anggaran sesuai kaidah perencanaan dan penganggaran sehingga terjadi peningkatan kualitas DIPA dan meminimalisir temuan auditor.
- ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK) : Pada saat jam kerja terdapat pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak fokus, maka dengan adanya program APIK ini setiap pegawai telah bertanggungjawab dan mempunyai akuntabilitas terhadap pekerjaannya dengan meminimalisir hal-hal yang dapat mengganggu fokus kerjanya.
- Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP) : Terdapat penyelesaian tugas oleh pegawai atau suatu unit kerja yang terlambat dan tidak tepat waktu, serta mempengaruhi kinerja unit kerja lain, maka dengan adanya program MANTAP ini maka telah tumbuh komitmen kesadaran untuk menghasilkan pekerjaan dengan kualitas tinggi dan diselesaikan secara tepat waktu.
- Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS) : Kurangnya kesadaran dalam memberi penghargaan dan apresiasi mengakibatkan motivasi dan hubungan sesama pegawai menjadi kurang optimal, maka dengan adanya program HARMONIS ini telah mendorong sikap saling menghargai dan apresiasi terhadap kontribusi kerja pegawai sekecil dan sesederhana apapun dalam pelaksanaan tugas. Terdapat apresiasi Sobat PILAR PSDKP bulanan dan tahunan.
- Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green) : Lingkungan kerja terdapat penggunaan energi yang boros, penggunaan kertas kerja yang banyak, penggunaan air minum dalam kemasan, maka dengan adanya program Go Green maka tiap pegawai telah timbul kesadaran untuk melakukan efisiensi dalam hal menghemat penggunaan air dan listrik, mematikan peralatan kerja sebelum pulang, dan mengurangi penggunaan kertas dan tinta dalam memproses dokumen kerja.

AKUNTABILITAS

KEUANGAN

A. Realisasi Anggaran

Di bidang anggaran, Direktorat POA sampai dengan TW III tahun 2025 telah melaksanakan 7 Rincian Output (RO) Kegiatan Pengendalian Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dalam DIPA Satker Direktorat POA, Ditjen PSDKP tahun 2025. Pagu Direktorat POA sebesar Rp 249.142.299.000 (dua ratus empat puluh sembilan miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Realisasi anggaran Direktorat POA pada TW III Tahun 2025 sebesar Rp. 163,491,023.000 (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 65,62% dari Pagu anggaran.

Tabel 35. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA TW III Tahun 2025

NO	RINCIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	243,820,299,000		66,50
1	RCG. 001. Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dirawat	26,683,029,000	11,020,968,000	41,30
2	QHD. 001 Operasi Kapal Pengawas (Hari Operasi)	17,607,027,000	128,682,729,000	56,07

3	QHD. 002 Operasi Pesawat Patroli (Hari Operasi)	40,000,000,000	22,429,638,000	70,74
5	FBA. 001 Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Operasi Armada	547,000,000	-	-
6	AFA. 001. NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	220,000,000	-	-
7	ABW. 001. Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	300,000,000	-	-
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5,322,000,000	1,357,688,000	25,51
8	RDS. 001. Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	3,811,000,000	1,122,429,000	29,45
9	ACA. 001 Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	1,511,000,000	235,259,000	15,57
TOTAL PAGU		249,142,299,000	163,491,023.000	65,62

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Direktorat Pengendalian Operasi Armada selalu berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2025, Direktorat Pengendalian Operasi Armada dinilai cukup efektif dalam menggunakan sumber daya. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 105,92% (Kriteria: Baik), sedangkan anggaran yang digunakan terealisasi sebesar 65,62%.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengendalian Operasi Armada telah melaksanakan beberapa hal antara lain: (1) memaksimalkan kinerja operasi melalui Pesawat Patroli Udara (*air surveillance*) untuk memberikan target operasi terverifikasi. Pola ini dikenal dengan istilah *intercept*. Pola ini memberikan target yang jelas kepada Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan di laut, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak kapal pengawas. (2) melakukan rapat-rapat koordinasi secara virtual sehingga mampu meminimalkan pengeluaran biaya. (3) mengurangi penggunaan kertas dan dokumen tercetak sehingga mampu mengurangi biaya operasional perkantoran.

C. Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Direktorat Pengendalian Operasi Armada melaksanakan beberapa kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja di tahun 2025 :



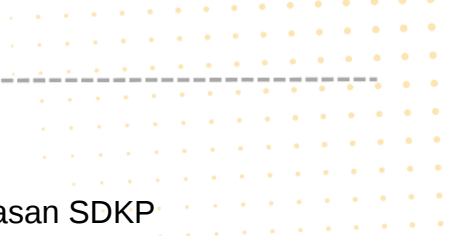
Aspek Operasi Armada

Berpartisipasi dalam kegiatan operasi bersama baik dalam dan luar negeri seperti Gannet Ausindo, Patkor Optima Malindo, Operasi Interdiksi BNN, Operasi Bersama Bakamla, Operasi Bersama Pengawasan dan Penindakan Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL). Selain itu, penerapan pola operasi *integrated surveillance system* (ISS) mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi.



Aspek Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

Optimalisasi penggunaan teknologi dalam memenuhi dan melakukan monitoring penggunaan logistik kapal pengawas. Hal tersebut mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan.

- 
- 
- 

Aspek Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP
Pada tahun 2025, akan dilaksanakan penilaian kondisi sarana pengawasan SDKP oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk mengetahui kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan, untuk itu Direktorat POA telah menyiapkan rencana pelaksanaan penilaian.
 - 

Aspek Sistem dan Informasi Intelijen SDKP
Pengembangan sistem pemantauan SDKP secara berkesinambungan dan peningkatan pemahaman pengguna aplikasi melalui Bimtek dapat meningkatkan keandalan operasional sistem pemantauan SDKP dalam memberikan data dan informasi.
 - 

POA Virtual Class
Direktorat Pengendalian Operasi Armada secara berkesinambungan melaksanakan POA Virtual Class berupa inhouse training secara daring maupun luring dalam rangka meningkatkan kapasitas personel serta sharing knowledge untuk meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.



BAB IV

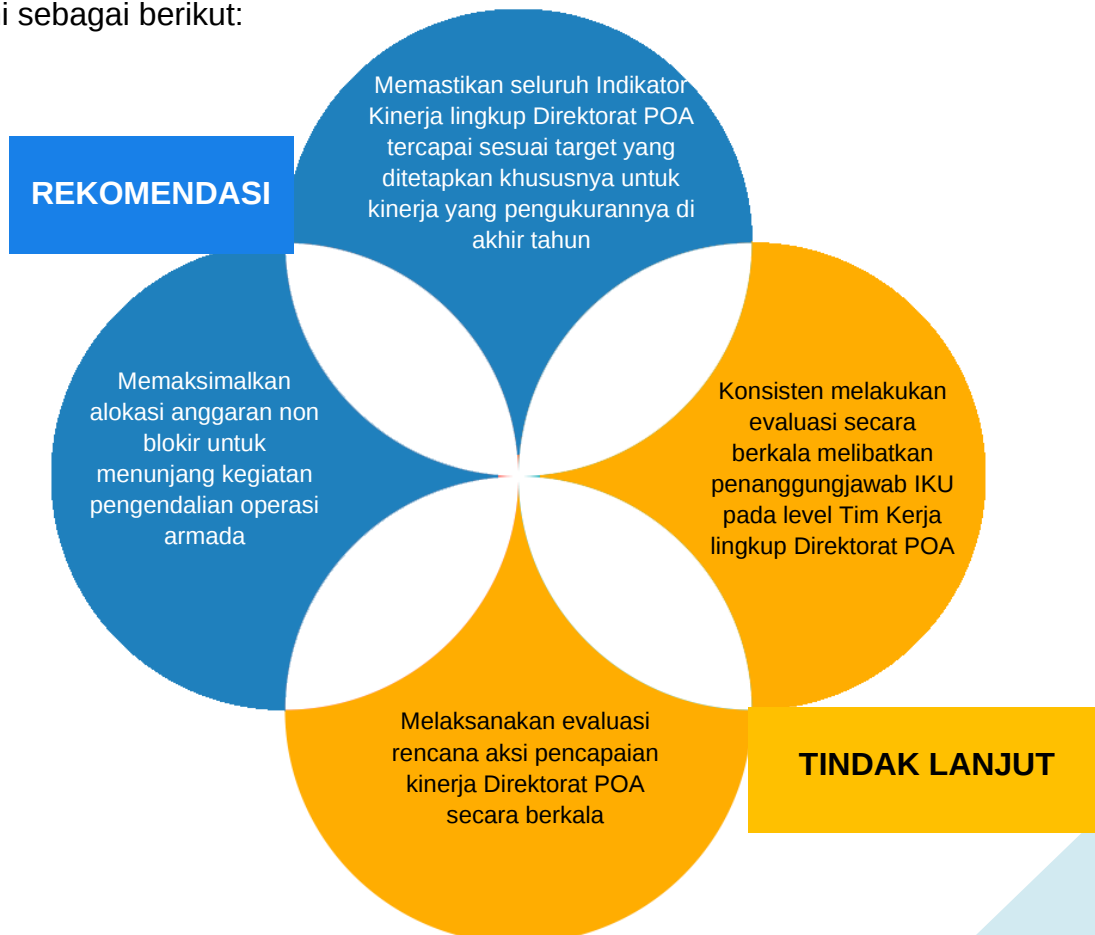
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nilai capaian kinerja rata-rata Direktorat POA periode TW III Tahun 2025 sebesar 105,92% dengan realisasi anggaran yang digunakan dalam mencapai kinerja tersebut, yaitu sebesar Rp 163,491,023.000 (65,62%).
2. Jumlah Indikator Kinerja Direktorat POA tahun 2025 adalah sejumlah 20 indikator kinerja. Dari target 20 Indikator Kinerja tersebut, sejumlah 7 diukur pada Triwulan III 2025. Dari 7 IKU yang diukur, sebanyak 3 IKU tercapai 100% dan 4 IKU tercapai lebih dari 100%.
3. Pada TW III tahun 2025 terjadi depresiasi nilai kinerja organisasi sebesar 8,85% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Hal tersebut dipengaruhi efisiensi anggaran, sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang kurang optimal.
4. Terdapat kendala dalam kegiatan supervisi Perawatan Armada Kapal Pengawas di UPT, yakni rendahnya tingkat validasi data karena proses supervisi masih dilakukan secara daring akibat keterbatasan anggaran.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis data yang disajikan pada Laporan Kinerja Direktorat POA periode Triwulan III tahun 2025, telah berjalan dalam rel yang benar. Hanya saja tentu masih perlu penyempurnaan pada periode Triwulan III 2025. Beberapa hal yang perlu menjadi rekomendasi dalam rangka pelaksanaan penyusunan kinerja TW III tahun 2025, yakni sebagai berikut:





LAMPIRAN



Lampiran 1. Nilai Kinerja Organisasi Direktorat POA Periode Triwulan III 2025



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

e-Kinerja Home

Kamis, 16 Oktober 2025

NKO September - 2025

Unit Kerja : DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA

Skor Kinerja : 105.92

Download

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, salahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target September	Capaian September	%	Target s/d September	Capaian s/d September	%	Tgl Input
SK.01	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif											
IKSK.1	Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		14-Oct-2025 10:25
	Tambah Data Dukung+											
SK.02	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif											
SK.03	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi						111,04			111,01		
IKSK.03.1	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI	%	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00	14-Oct-2025 10:25
	Tambah Data Dukung+											
	Data Dukung1											
IKSK.03.2	Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	60,00	73,33	120,00	60,00	73,33	120,00	14-Oct-2025 10:25
	Tambah Data Dukung+											
	Data Dukung1											
IKSK.03.3	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Indeks	Maximize	Rata-rata	82,00	82,00	95,14	116,02	164,00	190,42	116,11	14-Oct-2025 10:25
	Tambah Data Dukung+											
	Data Dukung1											
IKSK.03.4	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		14-Oct-2025 10:25
	Tambah Data Dukung+											
SK.04	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif						103,59			103,59		
IKSK.04.1	Indeks operasi kapal pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00			0,00	0,00		14-Oct-2025 10:25
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.04.2	Indeks operasi pesawat patroli	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	92,00	97,50	105,98	92,00	97,50	103,98	14-Oct-2025 10:25
	Tambah Data Dukung+											
	Data Dukung1											
IKSK.04.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	%	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00	14-Oct-2025 10:25
	Data Dukung1											
	Tambah Data Dukung+											
	Data Dukung2											
IKSK.04.4	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		14-Oct-2025 10:25
	Tambah Data Dukung+											
SK.05	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan											
IKSK.05.2	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	Indeks	Maximize	Rata-rata	100,00	0,00			0,00	0,00		14-Oct-2025 10:25
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.05.3	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00			0,00	0,00		14-Oct-2025 10:25
	Tambah Data Dukung+											
SK.06	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						102,27			103,16		
IKSK.06.1	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat POA	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	0,00			0,00	0,00		14-Oct-2025 10:25
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.06.2	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00			0,00	0,00		14-Oct-2025 10:25
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.06.3	Nilai PM SAKIP Satker lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	66,00	0,00			0,00	0,00		14-Oct-2025 10:25
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.06.4	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	%	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00	14-Oct-2025 10:25
	Data Dukung1											
	Tambah Data Dukung+											
	Data Dukung2											
IKSK.06.5	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Selditjen. PSDKP	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		14-Oct-2025 10:25
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.06.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Maximize	Rata-rata	95,00	95,00	100,00	105,26	190,00	197,50	103,90	14-Oct-2025 10:25
	Data Dukung1											
	Tambah Data Dukung+											
	Data Dukung2											
IKSK.06.7	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Direktorat POA	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		14-Oct-2025 10:25
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.06.8	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Direktorat POA	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	60,00	0,00			0,00	0,00		14-Oct-2025 10:25
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.06.9	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	0,00			0,00	0,00		14-Oct-2025 10:25
	Tambah Data Dukung+											
Tutup												

Lampiran 2. Memo penyampaian capaian kinerja Katimja PSIIK periode triwulan III 2025 (update)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOTA DINAS
NOMOR: 2440/DJPSPDKP.3/TU.140/X/2025

Yth. : Direktur Pengendalian Operasi Armada
Dari : Ketua Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Capaian IKU Triwulan III Tahun 2025
Tanggal : 13 Oktober 2025

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan periode Triwulan III Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Utama di bidang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan SDKP yang Akurat dan Terintegrasi sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN III		
			TAHUN 2025	TARGET	REALISASI CAPAIAN	CAPAIAN %
1	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	3 Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI	100%	100%	100%	100%
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	4 Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan informasi intelijen SDKP	82	60	73,33	122,22%
3	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	5 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	82	82	95,14	116%

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Direktur lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Febrianto Wardhana Utama

Lampiran 3. Perhitungan persentase cakupan WPPNRI yang dipantau pemanfaatan SDKP Triwulan III 2025

IKU 3 Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI

No	WPP	Bulan									Perhitungan (%)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	
1	571	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
2	572	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
3	573	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
4	711	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
5	712	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
6	713	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
7	714	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
8	715	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
9	716	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
10	717	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
11	718	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
PERSENTASE											100
											Target
											100
											Persentase terhadap target
											100%

Lampiran 4. Perhitungan capaian IKU pemenuhan data dan analisis periode Triwulan III 2025

IKU 4 Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan informasi intelijen SDKP

No	Indikator	Bulan									Bobot	Perhitungan (%)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep		
1	Analisis Indikasi Pelanggaran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40	30,00
2	Analisis Kapal di Kawasan Konservasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	15,00
3	Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	15,00
4	Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance	1	0	1	1	1	1	1	1	1	20	13,33
Indeks												73,33
											Target	60,00
											Persentase terhadap target	122,22%

Lampiran 5. Rincian Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Operasi Pesawat Patroli periode Triwulan III 2025

**Target dan Realisasi Capaian Kinerja lingkup
Subdirektorat Operasi Kapal Pengawas Dan Pesawat Patroli
Periode Triwulan III Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW III	Capaian TW III	%
1	Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli (indeks)	95	92	97,50	105,98

Lampiran 6. Penyampaian capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOTA DINAS
Nomor 2453/PSDKP.3/TU.140/X/2025

Yth. : Direktur Pengendalian Operasi Armada
Dari : Ketua Tim Kerja Penyiapan Logistik Armada Pengawasan
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Laporan Capaian Indikator Kinerja Periode TW III Tahun 2025
Tanggal : 10 Oktober 2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pengendalian Operasi Armada Periode Triwulan III Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja Tim Kerja Penyiapan Logistik Armada Pengawasan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Herry Mulyono

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP

IKU Tim Kerja Penyiapan Logistik Armada Pengawasan

No.	Indikator Kinerja	Periode Penilaian	Target
1	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	Triwulan	100

Capaian Target dan Realisasi Periode TW III Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW III	Capaian TW III	Keterangan
1	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100	Memenuhi

Rincian Perhitungan Indeks Kinerja Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas Periode TW III Tahun 2025

No.	Kompenen	Target TW III	Realisasi	%
1	Pemenuhan Kebutuhan BBM (30%)	30%	30%	100
2	Pemenuhan Kebutuhan Pelumas (20%)	20%	20%	100
3	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP (25%)	25%	25%	100
4	Pemenuhan Kebutuhan Air Tawar (15%)	15%	15%	100
5	Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan (5%)	5%	5%	100
6	Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (5%)	5%	5%	100
Total Nilai		100%	100%	100

PERSENTASE PEMENUHAN LOGISTIK ARMADA PENGAWASAN

No.	Indikator Pemenuhan Logistik	PERIODE				Bobot	Maksimal	Perhitungan	Keterangan/Data Dukung	
		TW I	TW II	TW III	TW IV		Persentase			
1	Pemenuhan Kebutuhan BBM (4/4)	1	1	1	-	30	100%	30	a	BA. BBM Akhir Bulan dan Surat Aju BBM Kapal
2	Pemenuhan Kebutuhan Pelumas (4/4)	1	1	1	-	20	100%	20	b	Surat Pengajuan Rencana Pembelian Kebutuhan Minyak Pelumas
3	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP (4/4)	1	1	1	-	25	100%	25	c	Surat Pengantar Kebutuhan Bahan Makanan/Natura dari Kapal Ke Kantor (Scan)
4	Pemenuhan Kebutuhan Air Tawar (4/4)	1	1	1	-	15	100%	15	d	Surat Pengantar Kebutuhan Air Bersih dari Kapal Ke Kantor (Scan)
5	Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan (4/4)	1	1	1	-	5	100%	5	e	Surat Pengantar Kebutuhan ATK / Bahan Komputer dari Kapal Ke Kantor (Scan)
6	Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (4/4)	1	1	1	-	5	100%	5	f	Dokumen Laporan SENJATA API dan AMUNISI
Persentase						100		100		

Ketua Tim Kerja Penyediaan Logistik Armada Pengawasan


Herry Mulyono

Lampiran 7. Hasil Penilaian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

Nomor : B.3923/DJPSPDKP.1/OT.710/X/2025 15 Oktober 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian
Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan
III Tahun 2025 Lingkup Ditjen. PSDKP

Yth.

1. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
 2. Kepala UPT Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
- di
Jakarta

Bersama ini disampaikan Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP sebagaimana terlampir untuk mendapat perhatian pada pelaksanaan realisasi atas rencana pengendalian risiko pada Triwulan III Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Suharta

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP

HASIL PENILAIAN

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dengan Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Berikut Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dengan hasil pada Tabel. 1 berikut:

No	Satker	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	3	3	100%
	Direktorat POA	22	22	100%
	Direktorat PSP	3	3	100%
	Direktorat PPSDP	9	9	100%
	Direktorat PPSDK	9	9	100%
	Direktorat PP	11	11	100%
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	12	12	100%
3	Pangkalan PSDKP Batam	14	14	100%
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	16	16	100%
5	Pangkalan PSDKP Benoa	16	16	100%
6	Pangkalan PSDKP Bitung	14	14	100%
7	Pangkalan PSDKP Tual	10	10	100%
8	Stasiun PSDKP Belawan	15	15	100%
9	Stasiun PSDKP Cilacap	11	11	100%
10	Stasiun PSDKP Kupang	8	8	100%
11	Stasiun PSDKP Pontianak	13	13	100%
12	Stasiun PSDKP Tarakan	8	8	100%
13	Stasiun PSDKP Tahuna	13	13	100%
14	Stasiun PSDKP Ambon	8	8	100%
15	Stasiun PSDKP Biak	9	9	100%
Total		224	224	100%

Lampiran 8. Data dukung IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PSDKP periode Triwulan II 2025

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOTA DINAS
NOMOR 1653/DJPSDKP.1/TU.140/X/2025

Yth : 1. Para Direktur lingkup Ditjen PSDKP
2. Para Kepala UPT lingkup Ditjen PSDKP
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon II dan III Lingkup Ditjen PSDKP" periode Triwulan III Tahun 2025
Tanggal : 13 Oktober 2025

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, bersama ini disampaikan data capaian Indikator Kinerja "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon II dan III lingkup Ditjen PSDKP Periode Triwulan III Tahun 2025" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit periode 1 Oktober 2024 s.d. 30 Juni 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan II Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II dan III sampai dengan 30 September Tahun 2025 (Triwulan III 2025).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Ditjen PSDKP yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100% (tuntas 181 dari 181 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit eselon II dan III periode Triwulan III Tahun 2025 disampaikan pada lampiran.
4. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas kerja sama, komitmen, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh satuan kerja di lingkup Ditjen PSDKP sehingga Ditjen PSDKP dapat menyelesaikan seluruh rekomendasi yang diberikan.
5. Kami berharap kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin, serta menjadi dorongan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi di masa mendatang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Suharta

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP

Data Rekapitulasi Capaian IKU
"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk
Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP" Triwulan III Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	59	59	100.00	0	0
2	Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	0	0	-	0	-
3	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	1	1	100.00	0	0
4	Direktorat Pengawasan SDK	0	0	-	0	-
5	Direktorat Pengawasan SDP	0	0	-	0	-
6	Direktorat Penanganan Pelanggaran	0	0	-	0	-
7	Pangkalan PSDKP Lampulo	2	2	100.00	0	0
8	Pangkalan PSDKP Batam	0	0	-	0	-
9	Pangkalan PSDKP Jakarta	0	0	-	0	-
10	Pangkalan PSDKP Benoa	11	11	100.00	0	0
11	Pangkalan PSDKP Bitung	20	20	100.00	0	0
12	Pangkalan PSDKP Tual	12	12	100.00	0	0
13	Stasiun PSDKP Cilacap	11	11	100.00	0	0
14	Stasiun PSDKP Belawan	22	22	100.00	0	0
15	Stasiun PSDKP Kupang	10	10	100.00	0	0
16	Stasiun PSDKP Pontianak	1	1	100.00	0	0